

No. **133** Januari - Februari 2017

BaKTI**News** www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**ANAK PAPUA
(JUGA) INGIN
MELIHAT INDONESIA**

**MEMUPUK
HARAPAN
DI LAHAN KERING**

**MAMA WALDE,
BERKARYA UNTUK
ORANG BANYAK**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Editor **M. YUSRAN LAITUPA**
VIKTORIA NGANTUNG
SYAIFULLAH

Suara Forum KTI **ZUSANNA GOSAL**
ITA MASITA IBNU

Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Website **ADITYA RAKHMAT**

Smart Practices
& Info Book **SUMARNI ARIANTO**

Database & Sirkulasi **A. RINI INDAYANI**

Design & Layout
Editor Foto **ICHSAN DJUNAEED**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTINews** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.*

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**

Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

*To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.*

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

BaKTI**News**

Januari - Februari 2017

No. **133**

- 1** Anak Papua(juga)
Ingin Melihat Indonesia
Oleh **Mujahid Zulfadli**
- 5** MCA-Indonesia
Memupuk Harapan
di Lahan Kering
- 10** Upaya Peningkatan Potensi
Kemaritiman Indonesia
Oleh **Mansyur Rahim**
- 13** BaKTI - MAMPU
Mama Walde, Berkarya untuk
Orang Banyak
Oleh **Frida Roman**
- 17** Menuju Advokasi Peliputan
dan Penulisan Isu Perempuan
dan Anak
Oleh **Mugniar**
- 23** Membuat Peraturan Daerah,
Belajar Dari Inisiator Perda Inisiatif
Oleh **M. Ghufuran H. Kordi K.**
- 28** Praktik Cerdas
Saatnya Mendengarkan
Suara Anak
- 31** Pesona Boak dari Oesapa
Oleh **Kamaruddin Azis**
- 35** Yayasan BaKTI- Unicef Indonesia
Meningkatkan Kapasitas
Pekerja Sosial untuk Layanan
Kesejahteraan Anak Integratif
Oleh **Mugniar Marakarma**
- 39** Update BatukarInfo
- 40** Kegiatan BaKTI
- 41** Info Buku
- Foto Cover : **Stevent Febriandy**





Foto Stevent Febrandy

ANAK PAPUA JUGA INGIN MELIHAT INDONESIA

Oleh **Mujahid Zulfadli**

Tinggal di sebuah kampung di ujung ketinggian seribu meter dari permukaan laut, sungguh bukan perkara mudah. Apalagi di Papua Barat. Apalagi orang baru seperti saya, yang kebetulan hanya menetap sementara demi menunaikan tugas selama setahun mengajar di sebuah sekolah dasar. Tanpa sinyal telfon, juga tanpa penerangan di malam hari. Fasilitas belajar pun sama minimnya.

Pengalaman itu terjadi sekitar dua tahun silam. Saat itu saya adalah Guru Wali Kelas III SD YPK (Yayasan Pendidikan Kristen) Pikpik Distrik Kramongmongga. SD ini

merupakan satu-satunya fasilitas pendidikan dasar yang ada di tiga kampung: Pikipik, Bahbadan, Kwamkwamur, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat.

Untuk keperluan komunikasi, mau tidak mau warga harus turun ke kota langsung atau membeli sebuah gawai elektronik yang dijuluki orang-orang kampung, HP Ceria. Tapi tidak seceria namanya. Perangkat digital khusus ini dioperasikan dengan menggunakan tower yang membutuhkan tenaga surya.

Tower ini dipasang di tengah-tengah wilayah distrik, berdiri pas di depan kantor distrik. Alat digital ini juga hanya dapat dioperasikan bila menggunakan perangkat dan kartu telepon dengan merek yang sama: 'Ceria'. Gawatnya lagi, perangkat ini berfungsi baik hanya jika matahari bersinar ceria. Hehe, cukup rumitlah waktu itu.

Lewat sudah setahun saya meninggalkan Kampung Pikipik, Distrik Kramongmongga. Namun pengalaman yang saya peroleh, masih begitu dalam membekas. Setahun mengajar, rasa-rasanya, sayalah yang memperoleh banyak pelajaran pelajaran berharga dari masyarakat, pemuka adat, tokoh agama, bahkan anak-anak sekalipun.

Seperti umumnya masyarakat di perkampungan, akses informasi cukup terbatas. Masyarakat hidup dengan begitu sederhana dengan mengandalkan hasil-hasil hutan (kebun masyarakat dan adat) serta sungai. Jangankan beraktivitas secara daring di internet, mengoperasikan komputer pun hanya beberapa orang yang bisa, termasuk Ibu Linda guru kelas empat.

Pada sisi yang lain, pemerintah ingin agar data pendidikan bisa termutakhirkan dalam satu platform yang disinkronisasi secara online, idealnya rutin setiap bulan berjalan. Padahal, tidak semua sekolah dan tempat punya infrastruktur dan sumber daya yang memadai

untuk menjalankan itu semua.

Waktu saya masuk ketika itu, sekolah sedang dalam posisi khawatir-kuatirnya karena tidak punya tenaga guru yang bisa menjalankan aplikasi Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Laman ini menyimpan seluruh data mengenai siswa, guru, kondisi serta fasilitas sekolah.

Nah, saat itu informasi sinkronisasi data datang terlambat ke telinga bapak Kepala Sekolah. Saat itu saya sedang mengajar di kelas. Tiba-tiba bapak Kepala Sekolah memerintahkan saya untuk segera bersiap-siap.

"Anak guru, bapak minta tolong, *kitorang* harus ke kota sekarang" jelasnya.

Tanpa bertanya lagi, saya mengiyakan dan segera mengikuti beliau. Angkutan juga bisa dikata tidak begitu lancar. Menjelang sore, taksi-sebutan untuk angkot-baru tiba dan kamipun segera meluncur ke kota.

Bapak Abraham, yang saya anggap bapak angkat di kampung, memastikan semua data-data terbaru di tahun ajaran baru sudah terangkut di tas coklat tuanya.

Mengecek lagi. Meyakinkan dirinya lagi sekiranya data-data guru juga sudah berada dalam genggamannya. Semua berisi kertas-kertas yang disela-selai dengan map.

Hampir semuanya tulisan tangan beliau. Beliau memang mengerjakan semua dengan tulisan tangan rapi. Waktu itu, saya sudah berniat agar suatu saat dan sesegera mungkin, akan men-digitalisasi berkas-berkas tersebut. Menjadi satu dalam sebuah *drive* penyimpanan di laptop milik sekolah.

Setelah beristirahat sejenak, kami langsung bergegas ke warnet (warung internet) yang menurut informasi memiliki koneksi paling cepat se-Fakfak. Saya lupa namanya, yang jelas tempatnya begitu nyaman.

Bangunan dua lantai, seluruhnya terbuat dari kayu, terletak memanjat di tebing batu. Di depannya pemandangan laut lepas terhampar bebas di depan mata. Pemilik tempat



Guru-guru di kota sudah mulai mahir memainkan teknologi dan mereka punya informasi langsung. Guru-guru di kampung, belum lagi di pulau-pulau terluar di distrik-distrik jauh, hanya bisa menerima informasi ketika berita itu sudah basi.

menggunakan menggunakan *IndiHome*, produk andalan Telkom Indonesia yang diluncurkan medio 2013.

Begitu kami masuk, sudah ada beberapa rombongan guru dari sekolah-sekolah yang ada di kota. Mereka bermaksud mengerjakan aplikasi Dapodik juga. Untunglah waktu itu kami tidak sendiri, jika ada kendala kami bisa bertanya. Begitulah kondisinya, guru-guru di kota sudah mulai mahir memainkan teknologi dan mereka punya informasi langsung. Guru-guru di kampung, belum lagi di pulau-pulau terluar di distrik-distrik jauh, hanya bisa menerima informasi ketika berita itu sudah basi.

Hampir empat jam kami berlutut dengan data-data dan sekolah siswa. Sebenarnya, saya merasa begitu bersalah sekaligus tak enak hati dengan Bapak Abraham. Beliau sudah memasuki usia senja, tapi bersikeras dengan semangatnya yang tidak kendur-kendur meski malam sudah begitu larut.

“Bapak, pulang sudah, nanti *beta* kerja sendiri” desak saya.

“Ah jang nak guru, kitorang kerja sama-sama ini barang. Ini juga demi anak-anak dan guru-guru yang lain *pu data*” jelasnya.

“Kalau *kitorang kasi* selesai ini malam, kirim, terus sinkron, dana BOS *kitorang pu* sekolah tidak akan datang terlambat. *Kitorang* bisa memanfaatkan cepat untuk beli anak-anak sekolah *pu* kebutuhan dan kebutuhan guru-guru,” Tambah beliau.

Alasan beliau yang terakhir membuat saya luluh. Jacket pemberian Dinas Pendidikan yang dipakai kepala sekolah sudah mulai menipis. Sambil berbatuk-batuk, beliau terus memerhatikan data yang ia tulis di kertas, lalu mencocokkan dengan apa yang saya ketik di layar laptop.

Saya benar-benar tidak tega. Tapi apa boleh buat, bapak Kepala Sekolah ingin menunaikan tanggung jawabnya. Jika malam ini juga selesai, besok pagi-pagi, kami akan carter mobil kembali ke atas pegunungan tempat sekolah kami berada. Membayangkan hal itu, saya jadi bersemangat

lagi untuk menyelesaikan data ini. Tak sabar untuk segera kembali mengajar, bertemu dengan anak-anak. Meski baru sehari ditinggal, rasanya sudah begitu lama.

Jam sudah menunjukkan pukul setengah tiga dini hari. Proses pemasukan data baru selesai. Saatnya untuk mensinkronkan dengan server yang ada di pusat pangkalan data. Proses ini memakan waktu kurang dari sepuluh menit jika koneksi mendukung. Kami bersyukur, meski semua guru-guru yang ada di warnet juga sedang mengerjakan Dapodik, kecepatannya juga masih tetap stabil. Sekali lagi, kami bersyukur.

Menjelang pukul tiga dinihari. Kami saling berpandangan, tersenyum lebar bersama-sama. Bahagia rasanya melihat bapak Kepala Sekolah tersenyum sepuas itu. Saya menjabat tangan kepala sekolah. Proses akhirnya selesai, dan kami bisa pulang ke kontrakan.

Insiden kecil tapi lucu di perjalanan pulang, juga menambah keakraban saya dengan beliau. Seekor anjing penjaga dengan tidak disangka-sangka, datang menggonggong sekali di hadapan bapak lalu menggigit bagian belakang sepatu. Tak perlu tahu saya ada di mana saat itu. Saya sudah meninggalkan beliau dengan mengambil jarak yang sejauh-jauhnya. Haha.

Sepanjang jalan, kami terus tertawa terus mengingat kejadian ini. Menurut pengakuan beliau sendiri, katanya baru sekali itu beliau dapat pengalaman digigit anjing. Maklum, bapak kepala sekolah punya anjing pemburu yang penurut.

Ibu Linda yang Selalu Ingin Tahu

Di sekolah kami juga ada seorang guru yang begitu berdedikasi dalam mengabdikan dan mengajar di sekolah. Segala urusan yang tidak penting di kota, jika itu harus meninggalkan anak-anak, tidak akan ia hiraukan. Ia adalah guru PNS yang asli dari Kampung Pikipik sendiri.

Namanya Ibu Guru Linda. Selain itu, dia juga Bendahara Persekutuan Jemaat Pemuda di tiga kampung. Kepedulianya terhadap anak-anak dan pemuda, membuatnya cukup disegani di

sekolah, meskipun masih berusia muda.

Saya begitu senang dengan beliau. Ia adalah guru yang bersedia mengawal pekerjaan Dapodik secara rutin sebagai operator sekolah. Biar bagaimanapun, saya akan meninggalkan sekolah ini, dan harus ada guru atau orang lokal yang dengan ikhlas mengawal keberlanjutannya.

Ibu Linda adalah orang yang menyediakan dirinya untuk terus belajar. Rutin, setiap bulan, mencari sela-sela waktu kosong mengajar, kami turun ke kota untuk mengisi aplikasi Dapodik. Proses pembelajaran dan pendampingan ini harus saya laksanakan sesegera dan seintensif mungkin sehingga Ibu Linda bisa semakin percaya diri dengan kemampuannya.

Suatu ketika, warnet yang biasa kami datangi sedang berada dalam masalah. Padahal tinggal sedikit lagi data tersebut rampung kami kerjakan. Keseruan tercipta karena waktu itu kami dikejar tenggat waktu dan harus segera kembali ke kampung untuk mengajar.

“Oh bu guru, *beta* ingat ada *pu* kenalan di kantor Telkom” kata saya yang mulai sumringah karena ada harapan.

Pada akhirnya, saya berinisiatif meminjam fasilitas internet nirkabel di kantor Telkom Fakfak yang diberikan cuma-cuma oleh seorang staff nya yang begitu baik hati. Namanya, Bapak Abu. Saya tidak akan pernah melupakan jasanya ketika kami para relawan pengajar yang tersebar di beberapa distrik membutuhkan akses cepat mengirimkan laporan rutin, kampanye pendidikan via sosial media dan blog, atau juga mengunduh data-data penting.

Dengan fasilitas itu juga, saya mengajak Ibu Linda mengerjakan data-data yang belum rampung dan menyelesaikan secepatnya. Ibu Linda terus bekerja meski masih selalu gagu, tapi saya bersikeras, beliau yang harus melakukannya sendiri. Dua laptop kami sediakan. Laptop sekolah dan laptop saya sebagai bahan pembelajaran. Saya bersyukur Ibu Linda bisa menuntaskannya.

Di lain hari, pada sela-sela mengerjakan Dapodik, Ibu Linda tumben mengeksplorasi banyak hal di internet dan bertanya pada saya. Sambil memerlihatkan gambar-gambar di Google, beliau bertanya.

“Pak guru, gambar-gambar ini *beta mo* simpan, *de pu cara bagemana?* Ini *beta mo* pake untuk ajar ponakan di *ruma*, sama untuk anak-

anak kelas satu nanti,” tanyanya. Saat itu dia belum mengerti bagaimana mengunduh dan menyimpan gambar-gambar yang ada di mesin pencari Google.

“Kalo ada *depu* gambar, kan lebih bagus. Terus *mo* pasang di kelas-kelas supaya anak-anak murid bisa liat dan cepat belajar” jelas Ibu Linda.

Dengan sabar saya coba mengajarkan cara untuk mengunduh dan menyimpan gambar-gambar di laman Google itu.

Setelahnya, dalam hitungan beberapa menit saja Ibu Linda sudah bisa membuka beragam jendela di laman pencarian dan menyimpan gambar-gambar itu ke laptopnya sehingga mudah dicetak ketika kembali ke kampung. Ibu Linda memang punya kemauan besar untuk terus belajar. Saya harap akan terus bertumbuh Ibu Guru Linda lain. Senantiasa belajar dan mencari tahu banyak hal meski dilanda banyak keterbatasan.

Saya punya harapan besar agar PIK (Pusat Internet Kecamatan) yang terletak di SMP negeri di pusat distrik bisa beroperasi lagi. Sebab, anak-anak lulusan SD dari sebelas kampung di distrik yang tidak punya kesempatan untuk bersekolah di kota, juga bisa merasakan hal yang sama dengan kawan-kawannya yang bersekolah di kota. Listrik dan internet yang menjangkau pelosok-pelosok nusantara adalah bagian dari mimpi anak-anak.

Rasanya sayang sekali meninggalkan murid-murid di kampung hanya untuk memasukkan data hasil sinkronisasi di Dapodik. Bila seandainya listrik masuk, dan *tower* juga bisa dipasang sesegera mungkin, anak-anak dan masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya.

Bukan hanya sekedar melihat foto-foto di kartu pos yang datang dari pelbagai daerah yang sengaja kupamerkan di kelas-kelas dan majalah dinding sekolah, tapi juga mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalamnya.

Saya membayangkan itu adalah manfaat yang begitu tinggi untuk anak-anak di daerah timur Indonesia, khususnya di Papua. Mereka bisa melihat Indonesianya. Karena mereka juga bagian dari Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis pernah menghabiskan waktu setahun mengajar di Papua. Catatan perjalanan dan kesehariannya bisa disimak di blog pribadinya: <http://mujahidzulfadli.wordpress.com>



MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT - INDONESIA
GREEN KNOWLEDGE ACTIVITY - GREEN PROSPERITY PROJECT

Memupuk Harapan di Lahan Kering

Oleh **Syaifullah**



Foto: Dok. Yayasan BaKTI/Yusuf Ahmad

Lamtoro (*Leucaena leucocephala*) atau sering disebut petai China sempat begitu populer di Indonesia pada dekade 1980-an. Pohon ini banyak ditanam dimana-mana sebagai salah satu metode penghijauan. Saking populernya, sebuah perusahaan multinasional menggunakan lamtoro sebagai namanya.

Nusa Tenggara Timur, khususnya pulau Timor juga tidak luput dari popularitas pohon lamtoro. Kala itu pohon lamtoro juga banyak ditemukan di pulau Timor. Selain mendeduhkan, daun dari lamtoro juga ternyata bisa jadi pakan hewan utamanya sapi. Sayangnya, hama kutu loncat menerabas habis hampir semua pohon lamtoro di pulau Timor di

Kami mengumpulkan *best practice* terkait pengembangan tanaman pangan seperti jagung, sorgum, kakao dan mente. Sementara untuk ternak kami lebih fokus ke sapi.

Ir. Salmijati Kaunang, MS

periode 1990-an. Perlahan-lahan hampir tidak ada lagi pohon lamtoro di pulau Timor, orang pun mulai lupa kalau pohon ini punya manfaat besar sebagai pakan hewan ternak.

Setelah lama terlupakan, lamtoro kembali menarik perhatian. Adalah tim dari Universitas Nusa Cendana yang kembali memperkenalkan fungsi lamtoro sebagai bahan pakan ternak, khususnya sapi. Tim dari Universitas Nusa Cenda (UNDANA), Kupang, Nusa Tenggara Timur berusaha mengem-bangkan tanaman lamtoro taramba yang bibitnya didatangkan langsung dari Hawaii, Amerika Serikat. Pilihan menggunakan lamtoro taramba karena tanaman ini tahan di lahan kering, kuat melawan serangan hama kutu loncat, dan dapat ditanam secara monokultur ataupun tumpang sari. Selain itu, lamtoro taramba juga efektif meningkatkan bobot harian sapi potong.

“Kalau menggunakan pakan yang lain, dalam sebuah bobot sapi potong hanya bertambah sekitar 15 Kg. Dengan pakan dari lamtoro taramba, bobotnya bisa bertambah sekitar 30 sampai 45 kg per bulan,” kata Dr. Ir. Mahmuddin Nur, Ms dari PETUAH UNDANA.

Usaha penggemukan sapi potong dengan menggunakan lamtoro



Foto: Dok. Yayasan BaKTI/Syaifullah

taramba ini adalah salah satu *best practice* yang dikumpulkan PETUAH UNDANA. Sejak memulai kegiatan di bulan Oktober 2015, tercatat sudah 18 *best practice* yang dikumpulkan oleh PETUAH UNDANA.

Universitas Nusa Cendana memang tercatat sebagai salah satu bagian dari konsorsium Perguruan Tinggi Untuk Indonesia Hijau (PETUAH), penerima hibah pengetahuan hijau dari Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-Indonesia).

“Kami mengumpulkan *best practice* terkait pengembangan tanaman pangan seperti jagung, sorgum, kakao dan mente. Sementara untuk ternak kami lebih fokus ke sapi.” ujar Ir. Salmijati Kaunang, MS juga dari PETUAH UNDANA

Dari Irigasi, Penggemukan Ternak Hingga Pendampingan Petani.

Pemanfaatan lamtoro taramba sebagai pakan sapi potong hanya satu dari 18 *best practice* yang dikumpulkan oleh PETUAH UNDANA. *Best practice* yang dikumpulkan pun beragam, dari irigasi sederhana di Pulau Semau, penggemukan sapi potong dan efisiensi pengembalaan hewan ternak hingga pengembangan kapasitas petani.

Policy brief yang kita buat ini sebenarnya langkah supaya riset yang kami lakukan bisa masuk ke dalam pengambil kebijakan atau pelaku industri. Kami pikir, sayang juga kalau riset ini tidak bisa diterima oleh pengambil kebijakan,”

Pulau Semau yang terletak tak jauh dari daratan Pulau Timor terkenal sebagai sentra penghasil bawang merah di NTT. Sayangnya, mereka menghadapi masalah besar soal ketersediaan air, utamanya di musim kemarau.

“Kendala utama dalam pengembangan bawang merah ini adalah keterbatasan air. Di lain sisi, struktur geologi dari tanah-tanah ini sebenarnya ada air, tapi posisinya di bawah sehingga tantangannya adalah menaikkan air tersebut. Kalau bisa membuat irigasi yang efektif maka tentu sangat potensial untuk pertanian,” ujar Dr. Ir. Mahmuddin Nur, Ms.

Selain pengembangan tanaman bawang merah melalui sistim irigasi yang efektif,



Foto: Dok. Yayasan BaKTI/Syaifullah

PETUAH UNDANA juga mengumpulkan *best practice* yang berhubungan dengan tanaman lainnya seperti padi jenis pare wangi, kacang tanah dan cendana.

Padi jenis pare wangi banyak terdapat di Pulau Sumba, utamanya Kabupaten Sumba Barat Daya. Universitas Nusa Cendana yang dimotori oleh Ir. A.S.S. Ndiwa, MP berusaha mengembangkan pare wangi sebagai produk komoditi unggulan dari Sumba. Beras pare wangi ini punya keunggulannya sendiri, selain aroma berasnya yang lebih wangi, pare wangi juga tahan di lahan kering dan tahan terhadap penyakit bercak cokelat.

Selain padi jenis pare wangi, tanaman lokal lain yang juga dikembangkan oleh Universitas Nusa Cendana adalah kacang tanah dari Pulau Rote. Kacang tanah Pulau Rote ini punya keunggulan pertama dari sisi ukuran yang cukup besar, mencapai 70 gram per 100 biji. Kedua, daya hasil tinggi mencapai 3 kilogram polong kering per hektar. Ketiga, kacang tanah Pulau Rote tahan hidup di lahan kering serta tahan terhadap hama bercak daun. Saat ini kacang tanah dari Pulau Rote sedang diusulkan untuk dijadikan varietas unggulan.

Best practice menarik lainnya yang dikumpulkan oleh PETUAH UNDANA adalah peningkatan kapasitas petani agroforestry di lahan kering yang dilakukan oleh Yayasan Mitra Tani Mandiri. Pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Mitra Tani Mandiri di beberapa tempat di Nusa Tenggara Timur sudah dilakukan selama puluhan tahun. Modelnya adalah kunjungan silang antar kelompok tani dampingan mereka. Tujuannya adalah menumbuhkan pemahaman tentang penggunaan teknologi untuk pertanian.

Policy Brief dan Masa Depan CoE.

Apa yang dilakukan oleh PETUAH UNDANA selama lebih dari satu tahun bukan hanya mengumpulkan *best practice* yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, tapi juga membuat *policy brief* yang berhubungan dengan pengetahuan hijau.

Hingga saat ini sudah ada delapan *policy brief* yang dibuat oleh PETUAH UNDANA. *Policy Brief* yang dihasilkan bermacam-macam, dari pentingnya pemetaan zona agroekologi, pengembangan padi pare wangi, pengembangan model model inti-plasma kakao, pengembangan



Ir. Salmijati Kaunang, MS, menaruh harapan besar, jikalau program hibah MCA-Indonesia telah selesai, semua program dan fasilitas CoE Universitas Nusa Cendana bisa diteruskan di bawah bimbingan dari Kemenristek DIKTI.
Foto Syaifulah

ternak sapi potong dengan integrasi kakao dan kopi, *agrosylvopasteur* sebagai alternatif pengembangan lahan kering di Sumba Timur, integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perencanaan pembangunan daerah, pentingnya mesin pemeras jagung untuk mendukung diversifikasi pangan di NTT dan sorgum sebagai strategi adaptasi perubahan iklim di lahan kering.

“*Policy brief* yang kita buat ini sebenarnya langkah supaya riset yang kami lakukan bisa masuk ke dalam pengambil kebijakan atau pelaku industri. Kami pikir, sayang juga kalau riset ini tidak bisa diterima oleh pengambil kebijakan,” kata Ir. Salmijati Kaunang, MS.

“Kami sedang berusaha melatih (para peneliti) cara menyusun *policy brief*. Sekarang ada banyak sekali hasil riset yang tersimpan rapi. Harapan kami, hasil riset itu nantinya juga bisa diakses oleh para pengguna atau yang membutuhkan,” lanjutnya lagi.

Untuk mempublikasikan *best practice* yang sudah dikumpulkan, PETUAH UNDANA membuat beragam brosur yang. Ini juga sebagai bagian dari Management Information System. Dalam brosur itu terdapat informasi tentang *best practice* yang dimaksud serta nara hubung atau mereka yang mengerjakannya. Pihak yang tertarik atau membutuhkan informasi lebih lanjut dipersilakan untuk langsung

menghubungi pelaksananya.

Ketika disinggung tentang masa depan *Center of Excellent* (CoE) atau pusat unggulan di Universitas Nusa Cendana, Ir. Salmijati Kaunang, MS menjelaskan secara detail. Menurutnya CoE Universitas Nusa Cendana memang belum memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Kemenristek DIKTI. Untuk itu, Universitas Nusa Cendana berusaha melakukan percepatan agar CoE yang sudah ada saat ini statusnya bisa ditingkatkan.

“Kami bersyukur karena pak rektor juga sangat mendukung rencana ini. Sebenarnya ide ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu, tapi baru sekarang difokuskan,” kata Ir. Salmijati Kaunang, MS.

Targetnya tahun 2017 CoE Universitas Nusa Cendana bisa mendapat pengakuan dari Kemenristek DIKTI. Dalam perjalanan menuju pengakuan ini, Ir. Salmijati Kaunang, MS mengakui bantuan yang sangat besar dari MCA-Indonesia. Hal ini berujung pada pengharapan ketika program hibah MCA-Indonesia telah selesai, semua program dan fasilitas CoE Universitas Nusa Cendana bisa diteruskan di bawah bimbingan dari Kemenristek DIKTI.

Nusa Tenggara Timur yang terkenal sebagai salah satu provinsi dengan luas lahan kering yang cukup besar nampaknya memang boleh menaruh harapan pada CoE Universitas Nusa Cendana. Beragam *best practice* yang dikumpulkan serta riset yang dilakukan kelak akan sangat menentukan nasib para petani dan peternak di Nusa Tenggara Timur. Kondisi lahan yang kering bisa jadi tantangan namun bisa juga menjadi berkah bila kita tahu cara mengelolanya. Setidaknya, CoE Universitas Nusa Cendana sedang memupuk harapan tersebut.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih jauh tentang Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pengetahuan Hijau di Indonesia, silakan menghubungi email: info@bakti.or.id

COREMAP CTI

Upaya Peningkatan Potensi Kemaritiman Indonesia

Oleh **Mansyur Rahim**

Sebagai negara maritim, dengan dua pertiga luas wilayah adalah laut menjadi potensi kemaritiman Indonesia, sekaligus potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Nilai perekonomian dari laut Indonesia diperkirakan mencapai 3 hingga 5 triliun dollar AS, atau setara sekitar Rp. 36 hingga 60 triliun per tahun.



Foto: Idris Djuanaed

U n t u k m e n j a g a kelestarian sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan program Coremap CTI (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative*) yang bertujuan bertujuan untuk mengelola sumberdaya terumbu karang, ekosistem terkait, keanekaragaman hayati secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Program Coremap – CTI ini telah berlangsung selama 5 tahun sejak tahun 2014 dengan lokasi program mencakup 7 (tujuh) kabupaten kota untuk wilayah timur (Pangkep, Selayar, Raja Ampat, Wakatobi, Biak, Buton, dan Sikka) dan 7 (tujuh) kabupaten kota untuk wilayah barat (Tapteng, Nias Utara, Kepulauan Mentawai, Bintan, Lingga, Natuna dan Kota Batam).

Untuk Provinsi Sulsel, Coremap – CTI, melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir & Laut (BPSPL)-Makassar, telah dikembangkan di Pangkep dan Selayar. BPSPL Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut-Kementerian Kelautan dan Perikanan. Coremap CTI mendukung BPSPL Makassar yang melaksanakan tugas pengelolaan meliputi; perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

Salah satu kegiatan terbaru dari BPSPL Makassar ini adalah sosialisasi konservasi sumber daya alam pesisir dan laut di dua pulau di Kab. Pangkajene Kepulauan (Pangkep) yaitu di Pulau Sabutung, Kec. Liukang Tupabbiring Utara yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Liukang Tupabbiring. Pemilihan sekolah sebagai lokasi ini



Kuda laut (*Hippocampus sp*) bernilai ekonomi tinggi sebagai produk ekspor karena tingkat permintaannya yang tinggi diluar negeri. Kuda laut kini dibudidayakan oleh masyarakat di pulau Sabutung.

juga bertujuan sebagai upaya edukasi.

“Kita melakukan sosialisasi konservasi ini untuk memberikan pemahaman guna meningkatkan kepedulian generasi muda tentang lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.” Ungkap Kepala BPSPL Makassar Ir. R. Andry Indryasworo Sukmoputro, M.M.

Dalam kegiatan ini terungkap bahwa kesadaran warga, utamanya usia sekolah, akan pentingnya menjaga terumbu karang sudah terlihat. Bahkan, upaya pelestarian terumbu karang sebagai ekosistem laut vital, rumah dan tempat pembesaran ikan di Pulau Sabutung sudah memberikan dampak positif.

“Dulu waktu kecil, tidak bisa *ki* mancing di dermaga karena tidak ada ikan. Sekarang, kalau mau mancing tinggal ke dermaga karena banyak *miikan*” ungkap seorang siswa.

Pada kesempatan ini, Kepala BPSPL Makassar Ir. R. Andry Indryasworo Sukmoputro, M.M. bersama staf Humas dan Kerjasama Ditjen Ditjen Pengelolaan Ruang Laut – Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga secara simbolis menyerahkan sarana pengembangbiakan dan bibit kuda laut. Sarana budidaya kuda laut di Pulau Sabutung ini sendiri sudah berdiri sejak Desember 2015.

Kuda laut (*Hippocampus sp*) ini memiliki ekonomi tinggi dan peluang ekspor yang besar mengingat tingkat permintaannya yang tinggi. Kuda laut diperdagangkan sebagai ikan hias (*ornamental fish*) dan juga sebagai bahan obat. Konsumsi kuda laut di Asia mencapai 45 ton pertahun (± 16 juta ekor), dimana konsumen utamanya adalah China (± 20 ton), Taiwan ($\pm 11,2$ ton) dan Hongkong (± 10 ton) (Syafiuddin, 2004). Peluang ini tentu bisa kita manfaatkan melalui upaya peningkatan potensi kemaritiman



Indonesia, dalam hal ini konservasi dan budidaya kuda laut.

“Konservasi dan budidaya kuda laut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.” Kata Kepala BPSPL Makassar.

Coremap CTI melalui BPSPL Makassar juga memberikan dukungan bantuan kepada Yayasan Makassar Skalia sebagai bentuk keseriusan dalam hal mengawal pelestarian lingkungan dan edukasi maritim. Coremap-CTI memberikan bantuan berupa 4 (empat) set alat Scuba Dive sekaligus kompresor untuk pengisian tabung selam melalui anggaran Coremap CTI tahun 2016 pada Yayasan Makassar Skalia.

Bantuan ini diberikan pada Yayasan Makassar Skalia yang melaksanakan program rehabilitasi terumbu karang di Pulau Samalona dan sekitarnya melalui edukasi maritim untuk pelajar dan mahasiswa di kota Makassar. Bantuan alat selam ini diharapkan bisa mendukung program dari YMS. Selain untuk melakukan pelestarian terumbu karang dan pemantauan jenis ikan karang, namun juga akan dimanfaatkan pelajar dan mahasiswa dalam aktifitas program edukasi maritim.

Pada tanggal 23 November 2016, alat selam tersebut digunakan juga untuk melakukan monitoring terumbu karang yang ada di perairan Pulau Badi Kab. Pangkep bersama beberapa

Foto bersama Kepala BPSPL Makassar, guru dan siswa SMA Neg 1 Liukang Tupabbiring Utara Pangkep, Staf Humas PRL - KKP dan jurnalis dari beberapa media nasional dan lokal.

Foto **Mansyur Rahim**

jurnalis dari berbagai media nasional dan lokal dan Humas Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan *Journalist traveling Coremap CTI* Ditjen Pengelolaan Ruang Laut.

Potensi terumbu karang di Pulau Badi yang berjarak sekira satu jam perjalanan laut menggunakan speed boat ini sangat menjanjikan karena memiliki luas tak kurang dari 2 hektar persegi. Selain itu, di Pulau Badi juga terdapat *learning centre* tentang bagaimana budidaya kuda laut yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Semoga upaya yang dilakukan oleh Coremap – CTI ini bisa semakin meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir utamanya usia muda akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir. Hal ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan kita melalui peningkatan potensi kemaritiman Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah seorang blogger dan penulis lepas serta aktif di kegiatan komunitas. Tulisan-tulisannya bisa dibaca di blog pribadinya:

<http://lelakibugis.net>

PROGRAM **MAMPU**

Mama Walde, Berkarya untuk Orang Banyak

Oleh **Frida Roman**

Sosok perempuan kelahiran Sukabiren, 25 Juni 1972 ini penuh semangat dan kegigihan tanpa lelah berjuang menyuarakan aspirasi dan hak-hak kaum perempuan melalui Kelompok Konstituen (KK). Waldetrudis Lin yang akrab disapa ibu Walde atau Mama Walde, adalah sedikit perempuan desa yang menjadi pelopor untuk pemberdayaan kaumnya.

Melalui Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan), Yayasan BaKTI Makassar dan PPSE-KA (Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua) di Desa Leosama dibentuk KK. Bagi Mama Walde yang menjabat sebagai Ketua KK, dia dan pengurus KK harus melakukan kegiatan-kegiatan penting dan berguna untuk penguatan masyarakat.

Menurutnya, manfaat program ini sangat baik dalam menyuarakan hak-hak kaum perempuan dan masyarakat miskin di Desa Leosama. Dengan demikian berkat pemahamannya ia mencoba mengorganisir anggota KK untuk membantu pemerintah desa dalam tugas-tugas pelayanan di tingkat desa yang berhubungan terkait tema-tema Program MAMPU.

Dikisahkan Mama Walde bahwa, lewat Program MAMPU, KK termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Kelompok Konstituen, melakukan pertemuan rutin bulanan, dan pendokumentasian hasil pertemuan dibuat secara baik sehingga menjadi bahan evaluasi bulan berikutnya. Saat ini Mama Walde dan

keluarga tinggal di Dusun Lalori, RT/RW 002/001 Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak.

Ia hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Mama Walde tidak bisa melanjutkan sekolah karena keadaan Ekonomi. Kata pepatah

“asam di gunung garam di laut” seperti yang terjadi dalam perkawinannya. Mama Walde sendiri berasal suku Marae yang merupakan daerah pegunungan, kemudian bertemu dengan suaminya yang berasal dari daerah pesisir. Bersama keluarga mereka memilih menetap di pesisir dengan alasan lebih mudah untuk mencari nafkah.

Dalam perjalanannya pada tahun 1989 ia dipilih mejadi kader posyandu. Dengan keterbatasan tingkat pendidikan yang hanya lulusan SD, ia juga dipilih menjadi Tutor pada PAUD (pendidikan anak usia dini) di Desa Leosama. Dalam perjalanan ia berpikir dan merasa pendidikan itu sangat penting, dan untuk menunjang semua itu ia harus memiliki ijasah sebagai pendukung, maka ia pun mengikuti pendidikan paket B dan C.

Ketika Program MAMPU memasuki Desa Leosama, sesuai kesepakatan bersama, maka Mama Walde dipilih menjadi Ketua KK “Laran Ida” Desa Leosama. Pemahamannya tentang lima tema MAMPU masih minim, namun seiring berjalannya waktu ia tetap serius dan tekun dalam mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan. Katanya untuk menambah pengetahuan. Menurutnya, ia dan perempuan desa lainnya bahwa



yang mereka pahami mengenai KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) adalah hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan fisik saja, dan pelakunya tidak bisa dihukum. Tetapi kini pengetahuan mereka sudah semakin luas, termasuk mengenai hak-hak warga.

Ketika Musyawarah Dusun (Musdus), semua anggota KK pada setiap dusun diundang. Pada tingkat Musrenbangdes Mama Walde dipilih menjadi perwakilan perempuan yang akan ikut dalam Musrenbang Kecamatan. Tidak hanya itu, ketika ada pengaduan masalah yang terjadi yang berhubungan dengan perempuan, Mama Walde bersama beberapa anggota KK menyampaikan kepada Kepala Desa setempat.

Dan ketika penyelesaiannya dilakukan di Kantor Desa secara resmi, Ketua dan 2 anggota KK diundang untuk menghadiri dan menyaksikan proses penyelesaian masalah. Menurutnya, menyampaikan informasi seputar

Sebelumnya, Mama Walde dan perempuan desa lainnya memahami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) sebagai hal yang berkaitan dengan kekerasan fisik saja, dan pelakunya tidak bisa dihukum.

lima tema MAMPU kepada masyarakat sangatlah penting. Mengingat tingkat pendidikan rata-rata SD bahkan ada yang tidak tamat, jadi gampang-gampang susah. Namun ia yakin jika semua dilakukan dengan tulus ke depannya perempuan akan mampu dalam segala hal yang dapat menunjang kehidupannya dan keluarganya.

Dalam rangka menunjang ekonomi produktif Mama Walde bersama anggota KK berinisiatif membuat olahan makanan lokal dari hasil laut dan pertanian, yang mana hasil dari olahan makanan lokal direncanakan akan dijual pada hari pasar hari minggu dan hari rabu disepanjang jalan umum di depan gereja di Desa Leosama.

Tahun 2016 masa kepemimpinan Kepala Desa Leosama akan berakhir dan akan digantikan oleh pemimpin yang baru, sebagai ketua KK "Laran Ida" Mama Walde diusung untuk masuk dalam bursa pencalonan Kepala

DI GARDA DEPAN. Mama Walde adalah salah satu perempuan yang mampu menggerakkan perempuan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Desa
Foto Dok. Yayasan BaKTI/MAMPU





Desa Leosama Periode 2016-2021. Hal ini sudah dilakukan pendekatan dari BPD Desa dan Para tokoh adat setempat serta masyarakat untuk meminta kesediaan Ibu Waldetrudis Lin (Ketua KK Leosama) maju dalam pencalonan Kepala Desa. Beliau sementara diskusikan dengan keluarga.

Selain itu, Kepala Desa Leosama meminta Mama Walde dan KK untuk masukan kegiatan tematik MAMPU agar dianggarkan dalam ADD (Alokasi Dana Desa). Usulan itu sudah diberikan dan terdokumentasi dalam RPJMDes Desa Leosama.

Desa Leosama salah satu Desa di Kecamatan Kakuluk Mesak yang berjarak sekitar 13 km dari Kota Atambua. Kondisi jalan menuju ke desa ini sangat bagus karena berada pada jalur jalan Atambua - Timor Leste dan Atambua – Oecuse salah satu distrik dari Negara Timor Leste. Jarak Desa Leosama menuju ke pelabuhan Atapupu kurang lebih 1 km. Desa Leosama tergolong desa pesisir karena satu areal dengan desa-desa lainnya di wilayah Atapupu. Sebanyak 99 % Penduduk Desa Leosama adalah petani dan 1% sisanya adalah PNS-TNI Polri, wirausaha, dan nelayan.

Tidak hanya berkecukupan mengurus pekerjaan domestik saja, namun perempuan juga wajib difasilitasi agar mampu menyukseskan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Foto Dok. Yayasan BaKTI/Yusuf Ahmad

Desa Leosama dikenal oleh masyarakat Kabupaten Belu sebagai salah satu desa penghasil sayur untuk kebutuhan Kota Atambua. Masyarakat desa ini memiliki daya juang hidup sangat tinggi karena dengan ketersediaan air yang pas-pasan diusahakan semaksimal mungkin untuk menanam sayuran dan hasilnya bisa dipasarkan ke Kota Atambua.

Dengan adanya KK diharapkan masyarakat Desa Leosama, terutama perempuan semakin berdaya dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Mama Walde adalah salah satu perempuan yang mampu menggerakkan perempuan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Bagi Mama Walde, perempuan tidak harus selalu menunggu, tetapi harus berinisiatif untuk kepentingan perempuan dan pembangunan desa.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Program ini. Hubungi kami melalui email info@bakti.or.id



Menuju Advokasi Peliputan dan Penulisan Isu Perempuan dan Anak

Oleh **Mugniar**

Foto: Silvania Mandaru

Diskusi Media Soal Anak dan Perempuan yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar pada tanggal 31 Desember lalu itu merupakan langkah advokasi peliputan dan penulisan isu perempuan dan anak. Diskusi kali ini merupakan diskusi keempat. Saya hadir pada diskusi pertama namun berhalangan datang pada diskusi kedua dan ketiga. Harapannya, setelah diskusi keempat ini akan lahir buku saku atau buku panduan dalam peliputan dan penulisan isu perempuan dan anak.

Mengapa hal ini penting? Karena masih banyak pelanggaran dalam meliput dan menuliskan kasus yang menyangkut isu perempuan dan anak. Contohnya, identitas korban masih ada saja yang membukanya bulat-bulat padahal itu kan tidak etis. Siapa yang bertanggung jawab kalau ada dampak usai pemberitaan? Wartawan atau media? Ih, belum tentu! Pada kasus kekerasan yang dialami oknum guru dan pelakunya anak SMA di Makassar beserta ayahnya misalnya, si anak mengalami bully habis-habisan di media sosial. Kasihan, karena dalam kasus seperti ini, walaupun anak sebagai pelaku, ia juga sebagai korban. Bagaimana masa depannya nanti?

Pembicaraan Tentang Isu Perempuan dan Anak Kali Ini Didominasi Lelaki!

Hujan turun deras sekali namun tak menghalangi para nara sumber untuk hadir pada waktunya. Saat saya tiba di Kafe Independen, jalan Toddopuli VII, para nara sumber Haswandy Andymas (Wawan, direktur LBH Makassar) dan Yudha Yunus-praktisi dan pemerhati perempuan dan anak, konsultan pada program MAMPU, BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) sudah duduk ganteng mengitari sebuah meja bersama Gunawan Mashar-jurnalis, pimpinan GoSulSel.Com yang pernah menjabat sebagai ketua AJI Makassar. Saat melihat mereka, saya baru sadar kalau isu perempuan dan anak kali ini akan dikupas oleh para lelaki. *Cool!*

Karena Perspektif Media Berpengaruh dalam Membangun Opini Publik

Agak lama menanti hingga dimulainya acara. Yang tadinya direncanakan mulai jam 10, molor hingga pukul 11.30 karena menunggu lebih banyak lagi yang datang di tengah derasnya hujan

yang mengguyur kota Makassar. Agam – ketua AJI Makassar akhirnya membuka juga diskusi ini.

Usai Agam berbicara, Lusi Palulungan dari program MAMPU BaKTI memaparkan mengenai pentingnya buku panduan peliputan dan penulisan isu perempuan dan anak. Mengapa? Karena perspektif jurnalis penting untuk membangun opini publik.

Fungsi jurnalis selain mewacanakan isu/persoalan saat ini, biasanya tidak signifikan untuk peran-peran yang lebih jauh, seperti melakukan pengawasan dan advokasi isu untuk menjadi kebijakan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Padahal dari beberapa program yang diimplementasikan, peran media sangat strategis dalam pembuatan kebijakan. Olehnya itu, Lusi mengharapkan buku panduan peliputan dan penulisan isu anak dan perempuan bisa segera hadir di tahun 2017.

Penyelenggaraan buku panduan menjadi perhatian program MAMPU [1] untuk diimplementasikan. MAMPU dan AJI Makassar memberikan training kepada beberapa jurnalis sehubungan dengan hal tersebut. Nantinya akan dipantau dan diharapkan apa yang ada di buku panduan bisa direplikasi di kabupaten/kota/provinsi di semua wilayah program kerja Mampu.

Selanjutnya, tiba giliran Gunawan Mashar sebagai moderator untuk berbicara. Dia mengatakan bahwa langkah advokasi kalau ada pelanggaran jurnalis media dalam peliputan isu perempuan dan anak, perlu didiskusikan. Karena masih banyak jurnalis yang pemahamannya mengenai peliputan ini masih sangat kurang sehingga merugikan anak dan perempuan.

Yudha Yunus mendapatkan giliran berbicara pertama kali sebagai nara sumber. Ia mengatakan penting untuk mendorong advokasi dari dua sisi:

legislatif dan jurnalis. Diharapkan nanti akan terbentuk buku panduan yang menarik. Yang dimaksud menarik adalah yang tidak menyusahkan, yaitu memudahkan orang melakukan sesuatu. Seperti panduan memasak mie instan, demikian perumpamaan yang dia berikan.

Mengapa Hak Anak dan Perempuan Perlu Mendapatkan Perhatian Lebih?

Yudha memberikan contoh kecil mengapa perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian lebih. Dalam penanggulangan bencana misalnya, bantuan tidak dipikirkan secara spesifik untuk perempuan dan anak-anak. Bantuan yang sangat dibutuhkan perempuan dan anak itu seperti pakaian dalam, pembalut, dan makanan bayi. Ketika bencana datang, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan barang-barang tersebut pada situasi yang mendesak. Sementara bantuan yang datang tidak memuat barang-barang itu. Kalau ada yang sementara haid, bagaimana dong? Dan bayi-bayi, mau makan apa?

Penting juga penyediaan fasilitas publik yang ramah anak/*accessible* untuk semua orang di toilet, tangga, dan meja sekolah anak. Toilet perempuan seharusnya lebih banyak jumlahnya daripada toilet laki-laki untuk jumlah laki-laki dan perempuan yang berimbang. Tangga yang tidak tertutup bagian bawahnya, akan memudahkan lelaki iseng mengintip pakaian dalam perempuan. Begitu pun meja sekolah yang bagian depannya tidak tertutup, akan memungkinkan terjadinya bullying di dalam kelas. Anak-anak lelaki akan mencari-cari alasan agar bisa menunduk dan mengintip dari bagian depan-bawah meja sekolah yang terbuka. Kalau kata suami saya, bukan hanya siswa lelaki, guru lelaki yang iseng juga melakukannya. Nah, lho!

Yudha melanjutkan penjelasannya, "Pernah ada yang mengatakan, 'Sembarangnya moPak Yudha, yang seperti itu diurus'. Maka saya jawab, 'Kalau istri atau anak perempuan Bapak naik tangga kemudian ada anak-anak muda nakal duduk di bagian bawah tangga dan mengintip ke dalam roknya, apa yang Bapak lakukan?' Lalu bapak itu menjawab, 'Akan saya pukul!'" Nah, kan, orang lebih *care* kalau yang kena perlakuan tidak enak itu istri atau anak sendiri!.

Perspektif gender bukan masalah pendidikan, banyak yang pendidikan-nya tinggi tapi perspektif gender-nya tidak ada.

"Kepekaan akan hal-hal seperti ini kurang sekarang. Bagaimana mengubah perspektif bahwa ini semua untuk keluarga sendiri juga. Bahwa bagaimana melindungi semua anak sebagai anak-anak sendiri kurang dirasakan orang-orang. Merasa aman karena bukan anak sendiri," Yudha melanjutkan penjelasannya.

Penjelasan berikutnya, Yudha mengaitkannya dengan pengaruh media, "Terkait isu anak dan perempuan itu agak sensitif. Banyak guyonan. Begitu bicara tentang janda, misalnya, konotasi negatif langsung berputar di kepalanya. Menjadi kebiasaan orang-orang kita. Baru guyonan saja sudah bias begitu, bagaimana aslinya? Belum lagi pejabat kita masih ada yang bias gender. Situasi seperti ini masih membayangi. Kalau ada di media, lebih bahaya lagi (karena tersebar luas dan memengaruhi opini publik)."

Ada dua istilah yang penting diketahui sehubungan dengan isu perempuan:

Pengarusutamaan Gender (PUG), sebagai salah satu strategi. Semua sektor bicara tentang gender. Urusan gender tidak lagi menjadi domain satu SKPD (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maksudnya) tapi menjadi domain semua sektor.

PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender): bicara perencanaan (harus ada uangnya).

Ada 7 prasyarat PUG melalui PPRG:

- 1 Komitmen Pemda/Pemdes. Perhatikan, apakah ada di visi/misinya? Apakah tertulis?
- 2 Regulasi (contohnya: Perda Perlindungan Anak). Bagaimana melahirkan regulasi umum tapi responsif. Juga ketika melakukan assesment melibatkan perempuan dan anak, misalnya dalam Perda Penanggulangan Bencana, haruslah responsif gender yang memerhatikan kebutuhan perempuan yang tidak dialami laki-laki.
- 3 Kelembagaan PUG. Bappeda, inspektorat, Keuangan, Pemberdayaan Perempuan (*driver*), motor utama.

- 4 POKJA PUG, ketua Bappeda, Badan Pemberdayaan Perempuan dan semua SKPD pengurus di sini
- 5 *Vocal Point*, ada 2 – 3 orang yang dianggap punya komitmen untuk mendorong isu-isu ini.
- 6 Forum data: data yang disajikan dua hal: jenis kelamin dan umur.
- 7 Ketersediaan data pilah (profil) gender. Menulis pada data: jenis kelamin (L / P). Alokasi harus berimbang. Misalnya cari tahu berapa banyak yang bisa ikut pelatihan di antara anggota? Kalau laki-laki 60%, perempuan 40% maka dalam pelatihan alokasinya 60% untuk laki-laki dan 40% untuk perempuan.

Di antara penjelasan tentang hal-hal tersebut, terselip pembicaraan tentang WC. “WC laki-laki dan perempuan harus terpisah. WC perempuan seharusnya lebih banyak kalau jumlah perempuan dan laki-laki sama banyak. Dikarenakan perempuan lebih lama berada di dalam WC dibandingkan laki-laki,” tutur Yudha.

Eh, benar, yah. Saya sendiri merasakan demikian. Butuh waktu lama untuk saya berada di dalam WC apalagi bila harus berwudhu. Kog tidak pernah terpikirkan untuk menuntut jumlah WC yang lebih banyak bagi perempuan, ya?

“Ini proses panjang. Perspektif gender bukan masalah pendidikan, banyak yang pendidikannya tinggi tapi perspektif gender-nya tidak ada. Sedang diusahakan sekarang 31 indikator kota layak anak terpenuhi. Di antaranya adalah sekolah ramah anak, tempat ibadah ramah anak. Masih banyak tempat ibadah yang melarang anak-anak berada di dalamnya. Di kota layak anak, setiap anak harus punya identitas (seperti akta kelahiran),” Yudha mengakhiri pemaparan panjangnya tentang isu anak dan perempuan.

Tentang Hak Anak dan Perempuan di Dalam Hukum

Nara sumber berikutnya, Wawan menyampaikan alasan mengapa tidak ada konvensi laki-laki dan orang dewasa (sementara ada Konvensi Hak Anak dan Konvensi Hak Perempuan di dunia ini), adalah karena pada faktanya terjadi diskriminasi pada anak dan perempuan. Makanya butuh perhatian khusus mengenai pemenuhan hak perempuan dan anak.

Pemaparan Wawan masuk pada prinsip-prinsip HAM yang berlaku baik bagi laki-laki dan perempuan, yaitu sebagai berikut:

- Universal dan non diskriminasi. Berlaku bagi setiap mausia. Non diskriminasi: tanpa pembedaan.
- Tidak bisa direnggut (inalienable). Melekat pada diri setiap orang. Dalam praktiknya hak yang melekat sering direnggut. Misalnya dalam perang dunia (hak untuk hidup)
- Tidak bisa dipisah-pisah. Tidak terpisah antara hak sipil politik dan hak Ekosob (ekonomi, sosial dan budaya).
- Saling tergantung. Saling mengandalkan/mensyaratkan antara hak yang satu dengan hak yang lainnya.

Adapun hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah sebagai berikut:

- 1 Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- 2 Dipisahkan dari orang dewasa
- 3 Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- 4 Melakukan kegiatan reaksional
- 5 Bebas dari penyiksaan, penghukuman, dan perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya
- 6 Tidak dijatuhi pidana mati
- 7 Tidak ditangkap, tidak ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai usaha terakhir dan dalam waktu paling singkat
- 8 Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- 9 Tidak dipublikasikan identitasnya.
- 10 Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- 11 Memperoleh advokasi sosial.
- 12 Memperoleh kehidupan pribadi.
- 13 Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak difabel (kata “cacat” saya ganti dengan kata “difabel” karena istilah “difabel” dianggap lebih manusiawi sekarang ini).
- 14 Memperoleh pendidikan
- 15 Memperoleh pelayanan kesehatan.
- 16 Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wawan memberi satu contoh kasus di Lapas Anak yang merugikan anak. Sudah didapatkan

surat kuasa penasihat hukum dari orang tuanya. Dalam perjalanannya, sidang berlangsung tanpa sepengetahuan penasihat hukum. Tak ada yang memberitahukan penasihat hukum perihal berlangsungnya sidang, termasuk orang tua si anak. Saat ditanyakan kepada orang tua anak tersebut, si orang tua mengaku dilema. Jaksa yang membujuknya untuk tidak memanggil pengacara karena bisa bertambah tinggi tuntutan hukuman. Kata jaksanya, dia yang akan menentukan keputusan. Namun pada kenyataannya, yang terjadi tuntutan tetaplah tinggi. Tidak terbukti kemauan jaksa benar berjalan. Anak itu tetap dituntut 2 tahun penjara padahal masih di bawah umur.

Contoh kasus lain adalah kasus yang heboh beberapa bulan lalu, mengenai anak SMA di Makassar yang bersama ayahnya memukul seorang guru bernama Darwis. Akhirnya semua orang tahu identitasnya setelah kasusnya di-*blow up* oleh media. Sebagian jurnalis berprinsip bahwa semua orang sudah tahu jadi untuk apa

pakai inisial lagi. Nah, sementara di UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak) dan Konvensi Hak Anak, identitas anak harus dirahasiakan. Seharusnya para jurnalis menjunjung tinggi HAM dengan menutupi identitas si anak. Dampaknya, anak ini sekarang depresi bahkan ada anak yang bernama sama dengannya di-bully di media sosial. Kasihan, ya padahal kan masih besar kemungkinan dia belajar dari kesalahan dan berubah menjadi baik. Nah, siapa yang mau tanggung jawab kalau masa depan anak itu hancur?

Wawan lalu menjelaskan mengenai aturan penahanan bagi anak yang telah berumur 14 tahun. Jika diduga melakukan tindak pidana, ancaman pidananya penjara 7 tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Namun ada kasus di mana hakim gagal melakukan diversifikasi karena ada intervensi pihak lain di dalamnya. Padahal diversifikasi akan mengkomodir

Gunawan Mashar

Jurnalis, pimpinan GoSulSel.Com

Di dunia online, apapun itu bisa naik. Tidak seperti media cetak sehingga nilai berita di media online lebih cair dibandingkan cetak. Dalam artian, media online punya ruang untuk memuat segalanya. Hal yang paling privat dimuat. Media online sekarang ada 3 jenis: mainstream (detik.com dll), UGC (penggunanya juga terlibat membuat berita sendiri, seperti Hipwee, Kompasiana, Selasar, Mojok.co) punya andil dalam penciptaan opini, dan agregator seperti Babe, Kurio, Caping, dan lain-lain. Akibat banyaknya space, memungkinkan untuk mengedepankan prasangka daripada fakta. Fakta jadinya bisa jauh lebih terlambat dibandingkan prasangka. Media online juga terbelit pada persoalan untuk hidup. Ini era yang edan tapi keniscayaan teknologi seperti itu.

Penyehatan menyeluruh seharusnya kepada medianya. Kerja jurnalis bukan kerja perorangan. Percuma kalau jurnalisnya punya pespektif yang baik namun tidak dibarengi redaktur dan pemimpin redaksinya. Dalam rapat redaksi, yang menentukan angle adalah orang-orang di atas reporternya. Redaktur beberapa media berpihak pada kepentingan industri.

Ini eranya "tsunami media". Hadirnya media online telah mengubah konstelasi, terutama dalam mudahnya membangun media. Sekarang mudah dengan beli hosting dan

menyebarkan ke mana-mana.

Pada media mainstream dan online yang benar-benar menerapkan prinsip jurnalisme, adatraining. Jika masih berniat baik, ada training-nya. Tapi kebanyakan tidak. Di era sekarang, banyak warga yang terlibat sebagai pembuat. Kelemahan jurnalisme warga: pada verifikasi. Dulu untuk mengetahui sesuatu, wartawan ada di tengah, warga ada di samping. Sekarang warga yang berada di tengah, wartawan ada di samping-samping.

Media online di Makassar ada 100 lebih tetapi cuma 1 atau 2 yang terdaftar. Ini menandakan lemahnya kualitas. Rencananya Dewan Pers akan memberi verifikasi, logo kepada media online dan akan dibatasi. Ke depannya nanti, nara sumber berhak menolak wawancara dari wartawan atau media yang tidak punya kompetensi.

Yudha Yunus

Konsultan pada program MAMPU - BaKTI

Terkait pemberitaan, kita berlindung pada kata "rating" dan pembaca/pemirsa. Istri dan gaya hidup kalau perlu disorot habis-habisan padahal tidak ada hubungannya dengan berita. Jadi tameng tersendiri, justifikasi. Terkait penulisan panduan: penting pengetahuan dasar mengenai isu, gerakan, istilah, apapun yang terkait perspektif gender harus dipahami. Dengan demikian akan memengaruhi penulisan.

kepentingan anak.

Terkait hal ini, Gunawan menghimbau kepada para jurnalis, “Jangan menyebutkan identitas, termasuk keluarga ataupun tempat tinggal. Seruan Dewan Pers melarang menyebut identitas korban asusila. Inisial pun jangan disebut. Sebutkan saja 'seorang anak'. Termasuk dalam kasus SARA dan yang traumatik. Pada Pedoman Media Cyber ada aturan mengenai berita apa saja yang bisa dicabut di media online. Pada Pedoman Perilaku Jurnalis: ada pedoman kasus-kasus kriminal pada isu perempuan dan anak. Aturan sudah sangat banyak, tinggal diejawantahkan!”

Ada 2 hal yang penting dalam hal ini, yaitu peliputan dan penulisan. Dalam peliputan: penting wartawan punya kepekaan pada kasus berisu perempuan dan anak, supaya punya standard akurasi yang lebih tinggi dibandingkan pada kasus lain. Karena kalau salah (tidak memahami dan cek dan ricek tidak bagus) kesalahannya bisa fatal. Wartawan jangan jadi

pemicu terjadinya *copy cat*. Sering terjadi, untuk kasus kriminal, wartawan memburu dramanya.

Pada babak diskusi, ada saran-saran dan pandangan-pandangan yang dilontarkan para peserta. Ada pula permintaan untuk menyatakan keberanian dalam memihak (kebenaran). Buku panduan memang perlu tetapi tentunya keberanian untuk mengaplikasikannya juga penting. Fauziah Erwin (ketua KPID Sulawesi Selatan) menyampaikan usulan penyusunan panduan, agar kiranya memperhatikan 3 hal ini: perilaku, standard konten, dan pemilihan angle dalam menulis. Dengan demikian dipikirkan juga bagaimana dampak ke depannya penyajian sebuah berita/artikel.

Berikut ini, saya mencatat hal-hal yang disampaikan ketiga nara sumber pada babak diskusi (*lihat box*).

Pada anak, baik dia pelaku ataupun korban, dia tetap korban. Lihatlah fakta-fakta lapangan.

Jurnalis hendaknya bisa mengungkap hal-hal yang tidak terungkap. Misalnya:

- Teliti apakah meja siswa di sebuah sekolah terlindung di bagian depannya atau tidak.
- Adakah WC perempuan di mal yang baru dibuka.
- Pada suatu razia oleh Satpol PP- apakah ada Satpol PP perempuan yang ikut merazia atau tidak. Sebab kalau tidak, rawan terjadi pelanggaran HAM.
- Fasilitas publik apakah aksesnya bisa dimanfaatkan perempuan, laki-laki dan anak-anak.
- Cek pula misalnya apakah tidak memungkinkan terjadinya pelecehan seksual ketika laki-laki dan perempuan bergelantungan di pete-pete smart.
- Atau, apakah manfaat dari area publik bisa dirasakan berimbang antara laki-laki, perempuan, dan anak.
- Nah, diharapkan jurnalis punya sensitivitas gender dan hal-hal seperti itu bisa diekspos yang nantinya akan mampu mendorong regulasi.

Gunawan Mashar

Jurnalis, pimpinan GoSulSel.Com

Ada pertarungan kontestasi (istilah “kontestasi” ini sebenarnya tidak ada dalam bahasa Indonesia, kira-kira Pak Wawan mau bilang “kompetisi” atau hal lain, yah?) nilai-nilai

di dunia ini. Wartawan pun menjadi pengusung nilai-nilai.

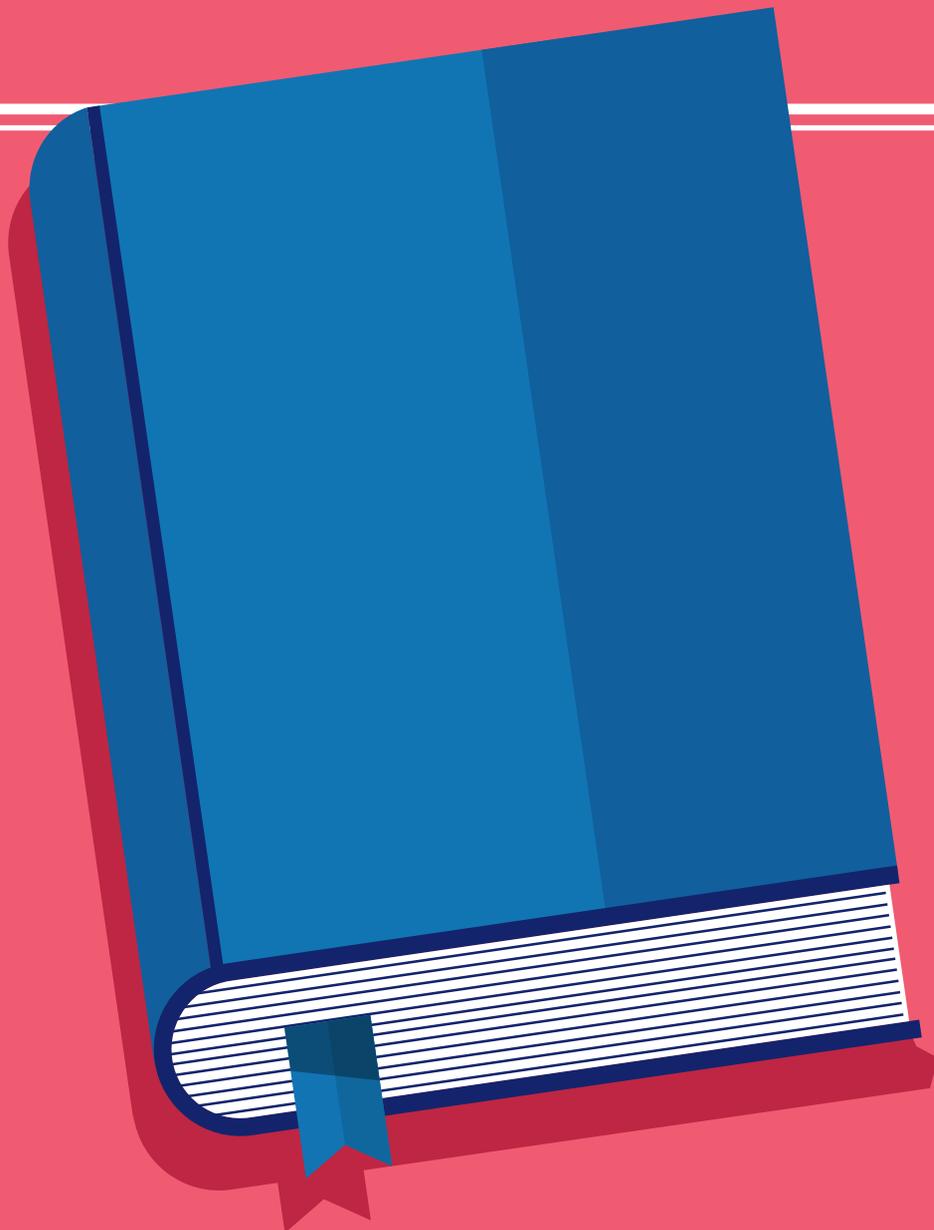
Demikian catatan saya dari diskusi akhir tahun mengenai isu perempuan dan anak dalam peliputan dan penulisan. Harapan saya, buku panduan untuk para jurnalis bisa segera hadir untuk menimalisir, bahkan kalau bisa-segera menghentikan ketimpangan yang terjadi dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam peliputan media. Blogger pun perlu tahu mengenai hal ini supaya kelak kita bisa sama-sama mengusung hal-hal baik demi kesejahteraan bersama.

Saya ingin menutup tulisan ini dengan satu kalimat kunci dari Pak Yudha:

Isu perempuan dan anak adalah isu mainstreaming, isu semua orang, dan seharusnya menjadi perhatian semua orang.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah seorang ibu rumah tangga di Makassar yang juga sangat aktif ngeblog. Blog pribadinya bisa dilihat di <http://mugniar.com>



MEMBUAT

Belajar dari

PERATURAN

Inisiator Perda Inisiatif

DAERAH

Oleh **M. Ghufan H. Kordi K**

Sudah menjadi rahasia umum pembuatan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seringkali tidak mengikuti tata aturan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan berbagai aturan turunannya.



idak sedikit Perda yang dibuat hanya sekadar menggugurkan kewajiban terkait legislasi di daerah. Makanya jangan heran, setelah disahkan,

perda-perda tersebut bukan hanya tidak diimplementasikan, tetapi dokumennya pun kadang tercecer entah ke mana. Pengalaman penulis mencari sebuah Perda mengenai transparansi yang telah disahkan di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, hingga berbulan-bulan dicari pun tidak ditemukan.

Jika dokumennya saja sulit ditemukan, tentu jangan tanya implementasinya! Setelah disahkan, perda-perda tersebut hanya menjadi dokumen negara di tingkat daerah, tidak lebih. Dana besar yang dialokasikan untuk membuat perda, seakan-akan hanya untuk menghabiskan anggaran negara yang ada.

Membuat Perda untuk Dibatalkan

Tahun 2016 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan sebanyak 3.143 Perda yang dianggap menghambat investasi. Saat ini, Kemendagri menginventarisasi dan mengkaji perda yang bertentangan dengan konstitusi, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemendagri akan mengkaji perda, apakah sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan UU sebagai pilar kebangsaan. Selain itu, Kemendagri juga tengah mengevaluasi perda maupun peraturan kepala daerah yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinekaan dan persatuan Indonesia.

Beberapa daerah telah membuat perda yang diskriminatif. Menurut Komnas (Komisi Nasional) Perempuan beberapa daerah membuat Perda yang diskriminatif atas nama agama dan moralitas. Daerah

Banyaknya perda yang dibatalkan oleh Kemendagri menunjukkan bahwa kualitas legislasi di daerah sangat rendah.

yang banyak mengeluarkan kebijakan diskriminatif adalah Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur (Soetjipto et al., 2014). Hingga tahun 2015 Komnas Perempuan menemukan 389 perda diskriminatif yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dari data-data yang ada, kemungkinan Kemendagri akan membatalkan perda semakin bertambah. Padahal jumlah perda yang dibatalkan sudah sangat banyak. Dari tahun 2002-2016 pemerintah pusat telah membatalkan 7.029 Perda. Jika pembuatan satu perda menghabiskan anggaran Rp. 200 juta sampai Rp. 500 juta, maka anggaran yang dihabiskan untuk membuat perda yang dibatalkan mencapai Rp. 1,4-3,5 triliun.

Tidak Sekadar Membuat Bab dan Pasal

Banyaknya perda yang dibatalkan oleh Kemendagri menunjukkan bahwa kualitas legislasi di daerah sangat rendah. Cerita-cerita lucu, ironi, dan memalukan terdengar di berbagai daerah, ketika pembahasan perda di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) provinsi dan kabupaten/kota.

Penulis beberapa kali mengikuti konsultasi publik dan sidang paripurna pembahasan perda di DPRD, dan menjadi orang yang ikut bingung, karena pihak eksekutif (SKPD) dan legislatif sama-sama tidak paham substansi perda yang dikonsultasikan atau dibahas. Sebagian anggota DPRD hanya tertawa-tawa dan



memberi suara sumbang dalam sidang paripurna.

Membuat Perda tidak sekadar membuat bab dan pasal. Namun itulah yang umum terjadi. Tiba-tiba muncul draft yang berisikan bab dan pasal, yang sebenarnya hanyalah *copy paste* (salin-tempel) perda-perda sebelumnya atau perda-perda daerah lain.

Mengikuti Tata Aturan

Di beberapa daerah kabupaten/kota, perempuan anggota DPRD mendorong pembuatan perda sesuai dengan aturan. Inventarisasi masalah atau tema yang perlu diperdakan diperoleh dari reses, usulan masyarakat, dan berbagai kajian.

Melalui Program Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan-atau dikenal sebagai Program MAMPU-mitra Yayasan BaKTI membuat kertas posisi mengenai permasalahan perempuan (dan anak) di wilayah program. Kertas poisisi tersebut berasal dari kajian lapangan yang

Yosephin M. Palamba (kiri) anggota DPRD Tana Toraja

Foto Dok. Yayasan BaKTI/MAMPU

dikonsultasikan dengan berbagai pihak, sebelum diserahkan kepada bupati/walikota dan DPRD setempat.

Kertas posisi ini kemudian ditindaklanjuti oleh anggota DPRD perempuan melalui reses. Dengan reses itulah anggota DPRD memvalidasi data dan informasi dari kertas posisi. Karena itu, usulan pembentukan perda kepada Baperda (Badan peraturan daerah) untuk dimasukkan ke dalam properda (program peraturan daerah)-dulu dikenal sebagai prolegda (program legislasi daerah)-merupakan usulan yang valid, tidak berdasarkan asumsi atau hanya keinginan pihak-pihak tertentu.

Melibatkan Publik

Selama ini, banyak sekali perda dibuat di belakang meja oleh konsultan atau tim ahli. Perda tersebut tiba-tiba dibahas di DPRD, disahkan, selanjutnya dibatalkan oleh



Kemendagri, atau tidak pernah diimplementasikan.

Situasi tersebut selalu menjadi diskusi para inisiator perda inisiatif di DPRD Parepare, Ambon, Maros, dan Tana Toraja. Pengalaman yang buruk tersebut sebaiknya tidak diulang, melainkan melakukan hal-hal baik sesuai dengan aturan yang ada.

Karena itu, ketika perda hendak dibuat, maka para inisiator yang mendorong perda inisiatif membentuk tim dan meminta pendampingan dari tim ahli atau konsultan. Tim ahli atau konsultan melakukan beberapa pekerjaan yang tidak bisa diimplementasikan langsung oleh para inisiator, namun inisiator selalu mengikuti semua tahapan proses yang berlangsung. Karenanya inisiator perda terlibat dalam assessment, penyusunan draf naskah akademik, dan penyusunan draft Raperda. Dengan begitu, inisiator memahami substansi perda secara utuh.

Dalam konsultasi naskah akademik Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di Tana Toraja, peserta konsultasi

Haeriah Rahman, anggota DPRD maros

Foto Dok. Yayasan BaKTI/MAMPU

mengapresiasi tim inisiator yang membuat perda dengan melibatkan diri dalam proses sejak awal.

Tidak mengherankan jika, para inisiator ini memahami dengan baik substansi perda yang dibuat. Kita menemukan Andi Nurhanjayani (DPRD Parepare), Leonara E. Farfar (DPRD Ambon), Haeriah Rahman dan Fitriani (DPRD Maros), dan Yosephine Maria Palamba (DPRD Tana Toraja) sangat fasih berbicara mengenai perempuan dan anak.

Para Inisiator

Membuat perda sesuai tata aturan juga butuh komitmen orang-orang di lembaga legislasi daerah (DPRD). Mereka yang mempunyai komitmen dan kemampuan didorong untuk mengambil inisiatif menjadi pionir dalam penyusunan perda.

Dalam pembuatan perda mengenai perlindungan perempuan dan anak di Kota



Parepare, Ambon, Kabupaten Maros, dan Tana Toraja, inisiator adalah anggota DPRD perempuan. Di Parepare, pembuatan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak diinisiasi oleh Andi Nurhanjayani dan Hj. Apriyani Djamiluddin. Andi Nurhanjayani bahkan menjadi Ketua Pansus (panitia khusus) dari Perda tersebut.

Di Kota Ambon, pembentukan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan diinisiasi oleh Elly Toisutta, Juliana Pattipeilohy, dan Leonara E. Farfar. Leonara E. Farfar menjadi Ketua Pansus perda tersebut.

Di Kabupaten Maros, Haeriah Rahman dan Fitriani menjadi inisiator penyusunan Perda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sedangkan di Tana Toraja, Yosephine Maria Palamba menjadi inisiator pembentukan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Yosephine Maria Palamba menggerakkan lima anggota DPRD perempuan di DPRD Tana Toraja membuat Perda Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pembelajaran Penting

Penguatan kapasitas terkait legislasi

Leonara E. Farfar (tengah) anggota DPRD Ambon

Foto Dok. Yayasan BaKTI/MAMPU

sangat penting bagi anggota DPRD. Namun penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan, workshop, TA (technical assistance), dan mentoring, tidak banyak berguna jika tidak diikuti dengan implementasi langsung penguatan kapasitas tersebut.

Belajar dari pengalaman Yayasan BaKTI dan mitranya dalam penguatan kapasitas anggota DPRD dan implementasi penguatan kapasitas tersebut, terutama terkait dengan legislasi, menunjukkan bahwa DPRD mampu membuat Perda yang berkualitas dan dengan melibatkan publik dalam proses pada setiap tahapan, ketika anggota-anggota DPRD yang ada mempunyai kapasitas yang mumpuni, yang menguasai tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat di daerah.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Database dan Publication Media Officer BaKTI-MAMPU dan dapat dihubungi melalui email ghufran@bakti.or.id

SAATNYA MENDENGARKAN SUARA ANAK

Anak adalah generasi penerus bangsa. Pernyataan ini sudah sangat populer dan diaminkan oleh sebagian besar masyarakat. Bahkan hampir semua orang sadar bahwa apapun yang kita lakukan adalah bertujuan untuk kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak. Ironinya, dalam realita anak nyaris tidak dilibatkan dalam upaya pencapaian masa depan mereka.

Anak tidak pernah diberi ruang untuk berekspresi, sehingga berdampak pada anak merasa tidak berarti dan tidak memiliki rasa kepercayaan diri untuk bersosialisasi dalam kehidupannya sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga, maupun masyarakat.

Keadaan ini juga terjadi di Desa Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka-NTT. Anak tidak diberi kesempatan atau ruang untuk mengekspresikan diri mereka terutama menyampaikan sesuatu yang mereka inginkan baik di rumah bahkan dalam lingkup pemerintahan desa.

Orang tua mengangap anak tugasnya hanya belajar dan “makan”. Anak tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan desa,

karena anak dipandang sebagai orang yang lemah dan tidak memiliki kemampuan terutama berpartisipasi dalam pembangunan di desanya.

Pembangunan desa seakan menjadi milik orang dewasa. Tidak heran kalau banyak anak-anak usia remaja yang mengespresikan diri mereka dengan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti anak remaja dan sebagian orang dewasa dijalan menimbun jalan yang rusak lalu meminta uang kepada orang-orang yang melewati jalan tersebut, sering memaki bahkan berkelahi saat ada pesta, mabuk-mabukan, dan hal-hal negatif yang menyebabkan anak-anak banyak yang putus sekolah di usia remaja,

Keprihatinan ini yang kemudian mengerakkan hati Kepala Desa Wolomotong, Romanus Rabu untuk mendorong perubahan persepsi masyarakat dan kebiasaan yang tidak melibatkan anak-anak. Untuk menangani masalah dan persoalan tersebut maka menurutnya, anak-anak perlu dibina sejak dini dan dilibatkan dalam seluruh proses seperti pelibatan anak dalam ber-kulababong (musyawarah) mulai dari rumah sampai ke tingkat pemerintahan desa, sehingga perlu ada



wadah bagi anak-anak untuk mengespresikan diri mereka melalui bakat dan minat mereka.

Selain itu, dalam setiap kesempatan atau kegiatan pemerintah desa mendorong orang tua untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang positif.

Memberikan ruang bagi anak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Begitu banyak tantangan yang dihadapi. Pada 2014 anak-anak mulai dilibatkan dalam musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes).

“Buat apa anak ikut Musrenbang, mereka bisa apa?”. Demikian pikiran orang-orang ketika melihat anak-anak dengan seragam sekolah hadir dalam Musrenbang Desa Wolomotong pada 2014.

Mereka hadir bersama beberapa orang guru untuk mewakili sekolah mereka. Hal tersebut diungkapkan oleh orang-orang dewasa, karena sejak Wolomotong menjadi sebuah desa, anak-

anak tidak pernah dilibatkan. Musrenbang seakan menjadi milik orang dewasa.

Bukan hanya dari masyarakat, tapi tantangan lainnya yang muncul adalah dari guru itu sendiri, karena anak dianggap mengkritik apa yang terjadi di sekolah seperti guru yang sering terlambat, sering mengantuk di kelas dan mereka menyampaikan apa yang mereka tidak sukai di lingkungan mereka.

Kritikan anak-anak tersebut dinilai sangat bagus oleh Romanus Rabu terutama karena anak-anak menyampaikan sesuai dengan apa mereka alami dan mereka menyampaikannya secara jujur serta polos.

Alasan ini yang mendorong Kepala Desa kembali mengundang anak-anak hadir pada Musrenbangdes pada 2015.

Salah satu prioritas pada 2015 yaitu pembangunan jalan ke salah satu sekolah di Desa Wolomotong yaitu SDN Wodonwair direalisasikan. Usulan itu berdasarkan penilaian anak-anak dalam forum Musrenbangdes dimana jalan ke sekolah tersebut belum dirabat dan saat

musim hujan harus ditempuh dengan berjalan kaki, sehingga menjadi salah satu faktor guru sering terlambat ke sekolah.

Dibangunnya jalan tersebut semakin meyakinkan masyarakat dan guru bahwa kritikan dan usulan anak-anak sangat baik, dan terkadang tidak dipikirkan oleh orang dewasa.

“Untung anak-anak bersuara dalam Musrenbang, kalau tidak jalan ke sekolah kami mungkin belum dirabat”, ujar Wakil Kepala SDN Wodonwair, Since.

Dampak lain memberikan ruang bagi anak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat dari sisi keluarga dan lingkungan sekolah adalah Anak-anak sudah dilibatkan dalam diskusi keluarga dan pengambilan keputusan, Anak-anak semakin aktif dalam proses belajar mengajar dan membuat guru-guru mempersiapkan diri sebelum mengajar dan anak-anak juga terlibat dalam membuat keputusan seperti membuat aturan kelas, orang tua terlibat dalam mendukung kegiatan di sekolah dan yang paling menggembirakan adalah munculnya rasa percaya diri pada anak-anak

Hal lainnya yang juga terealisasi berdasarkan usulan anak-anak adalah para kader posyandu yang mulai lebih memperhatikan kebersihan lingkungan posyandu “Ini karena kritikan anak, makanya posyandu kami lebih bersih.”, ujar kader Posyandu Golon Galat, Henderika Heret.

Agar anak-anak dapat terorganisir dengan baik maka kepala Desa Wolomotong membentuk Forum anak desa (Forades) dan karang taruna serta mengalokasikan dana desa setiap tahun untuk membiayai program yang disusun anak-anak.

Selain itu, juga menyediakan satu ruang yang menjadi sekretariat Forades yang dilengkapi dengan perpustakaan dengan bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia.

Dalam setiap pertemuan yang dilakukan di desa, Romanus Rabu selaku kepala desa selalu mengundang anak-anak Forades dan karang taruna untuk terlibat, baik dalam merencanakan maupun evaluasi program dengan pertimbangan tidak mengganggu proses belajar anak.

Pada Musrenbang 2016, kepala desa ini kembali melibatkan anak-anak dan bahkan memberikan kesempatan bagi anak dari desanya untuk terlibat dalam Musrenbang Kabupaten Sikka yang dilakukan di Universitas Nusa Nipa, Maumere.

Dengan melihat proses Musrenbang yang dilakukan di tingkat kabupaten dengan keterlibatan anak semakin menginspirasi Romanus agar setiap tahun dan pertemuan-pertemuan di desa selalu mengundang anak-anak seperti apa yang telah dilakukannya selama ini.

Dia bertekad terus mendukung keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan desa. Pemerintah Desa bersama BPD saat ini sementara menyusun sebuah peraturan pembangunan desa berperspektif anak.

Peraturan desa berperspektif anak tersebut berdasarkan kelompok umur anak yang mengatur tentang peran dan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah atau penyedia layanan, orang tua dan masyarakat pada umumnya dalam memenuhi kebutuhan anak baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan dan penanganan terhadap anak bermasalah, termasuk mengatur tentang partisipasi dan keterlibatan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Dengan adanya peraturan desa tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa untuk mendukung partisipasi dan keterlibatan anak secara terus-menerus dan berkelanjutan melalui ADD. Kegiatan itu dinilai berdampak positif untuk kepentingan terbaik anak-anak di Desa Wolomotong, sehingga cita-cita Kepala Desa Wolomotong untuk menjadikan desanya sebagai desa layak anak dapat terwujud. Hal tersebut diyakini oleh Kepala Desa Wolomotong, karena mendapat dukungan masyarakat dari multipihak di desanya.

Saat ini bukan hanya pemerintah desa, namun masyarakat desa juga mulai sadar akan pentingnya kehadiran dan partisipasi anak-anak dalam pembangunan desa. Saatnya suara anak didengar!

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih jauh tentang Praktik Cerdas ini, silakan menghubungi email: info@bakti.or.id

Pesona Boak dari Oesapa

Oleh **Kamaruddin Azis**

Liukan deras angin timur di atas Kota Kupang menyambut pesawat Batik Air yang membawa saya dan ratusan penumpang dari Jakarta. Burung besi itu terseok di kolom udara sebelum mencium lembut landasan Bandara El Tari Kota Kasih Kupang, Sabtu 11/06/2016.

Angin cukup kencang di ibu Kota Nusatenggara Timur kali ini. Kunjungan ini berkaitan hembusan kabar pengelolaan kawasan mangrove di pantai Oesapa, Kelurahan Oesepa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang disebut telah menjadi oase baru berwisata di Kota Kupang.

Siang itu, di Pantai Oesapa telah berdiri warga menyambut saya dan rekan perjalanan Untung PL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mereka Kris Long, Dance Foe alias Deris serta Dr. James Adam, konsultan untuk program pemberdayaan masyarakat pesisir atau Coastal Community Development Program (CCDP) di bawah naungan Direktorat Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disokong oleh *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) di Kota Kupang.

Tidak jauh dari tempat duduk kami terlihat jembatan kayu kokoh dengan batas pegangan kayu bercat biru muda. Kayu titian dibiarkan sesuai warna aslinya. Ada sambutan selamat datang di gerbang *track*. Desir angin menari di telinga kala saya memandangi pohon-pohon mangrove melambai dari tepi pantai siang itu. Inilah jembatan sekaligus lintasan *trek* kayu bagi pengunjung yang ingin membaurkan pandangan dan perhatiannya pada keindahan bahari pantai Oesapa yang dibanggakan itu. Dibanggakan sebab ini menjadi salah satu tempat rekreasi di Kota Kupang yang disiapkan Kelompok Pengelola Sumberdaya Alam (PSDA) pesisir yang diletupkan oleh Dance, kerap disapa Deris, Deris Foe.

Deris, lelaki kelahiran empat puluh tiga tahun silam di Oesapa ini menjadi dirijen sekaligus pemantik ide pembangunan fasilitas rekreasi sekaligus matra pengelolaan lingkungan di Kota Kupang.

“Pantai kami tergerus karena dulu ada penggalian pasir di sekitar sini,” kata Kris Long, ketua komite kerja CCDP-IFAD yang menjalin dan mengkoordinasi gagasan kelompok-kelompok dampingan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang atas kerjasama dengan CCDP-IFAD. Oesapa dibingkai oleh laut, sungai dan bakau, beberapa tahun silam, mangrove kian berkurang hingga datang inisiatif CRMP atau Coastal Resources Management Program tahun 90an yang mengajak warga mulai membangun harapan dengan menanam pohon mangrove.

“Ya ini, hasil penanaman boak itu. Dulu tahun

70an dong orang-orang tua masih gali dan jual pasir dari sini,” kata Kris dalam aksan khas Kupang. Kris tahu persis bahwa sejak berkembangnya mangrove ini kepiting mulai banyak, warga tak lagi menebang bakau hingga bisa rindang menghijau seperti sekarang. Boak adalah pohon mangrove yang tumbuh dan kini menjadi benteng pantai Oesapa. Selain karena pengambilan pasir pantai, abrasi diperparah pula oleh pembangunan tanggul tambak.

“*Dong* beton tambak, jadi airnya lagi ke sini,” sungut Kris.

Melihat boak yang mulai merimbun, Deris diam-diam merawat gagasannya, membayangkan betapa indahnya jika mangrove Oesapa ini menjadi wilayah perlindungan sekaligus tempat rekreasi dan mendatangkan manfaat ekonomi.

“Gagasan membangun sudah lama, kebetulan sebagai ketua RT saya mendengar ada *master plan* atau perencanaan wilayah Kota Kupang dan Oesapa ini masuk. Itu juga angan-angan sejak tahun 2012,” ungkap Deris. Perencanaan yang dimaksud Deris adalah pengelolaan jangka 20 tahun yang dikaji oleh Bappenas dan Bappeda Kota Kupang. “Nah ternyata konsep tersebut sama dengan konsep 2012 itu. Ada pula rencana dari PU dan Bina Marga provinsi, ada konsultan dari Jawa yang survei tapi kita sudah lama memang,” ujarnya.

“Ide ini kami sampaikan ke CCDP-IFAD, ke Pak Robby (PIU), ibu Welma, bagaimana supaya mangrove ini bisa dikelola. Dari angan-angan kemudian jadi seperti sekarang ini,” terang Deris. Tersungging senyum di bibirnya. Bagi Deris motif pendirian bangunan ini didasari alasan ekonomi masyarakat.

“Sebagai (ketua) RT, pembangunan ini berkaitan dengan kepentingan ekonomi, memanfaatkan hutan mangrove ini. Warga selain bergantung pada tani garam, mereka juga bisa memperoleh pendapatan dari jual-jualan atau ada pemasukan dari sumbangan sukarela warga,” tambahnya.

“Warga bisa menawarkan jenis minuman, makanan, termasuk bikin souvenir seperti topi dengan pesan perlindungan mangrove ini,” Deris melanjutkan sembari menunjukkan topi bertuliskan Ekowisata Mangrove Kupang. Selain memotivasi warga untuk menjaga mangrove, Daris juga pernah berinisiatif memanfaatkan lahan kosong sekitar pantai untuk menanam

kacang tanah, umbi-umbian dan berhasil.

Apa yang dirawat kelompok PSDA Oesapa ini patut diapresiasi. Di dalam areal track terlihat pohon mangrove seperti jenis *Avicennia* yang sangat tinggi hingga 10 meter dengan dahan dan daun yang menjuntai. Lebarnya areal ini sekitar 1 kilometer dengan ketebalan dari pantai ke laut maksimum 200 meter. Manfaatnya bisa terbaca, bagi mangrove yang tak lagi tebal ada abrasi yang hebat di selatan, sedangkan yang tebal tak terlihat pengikisan.

Di Oesapa, mangrove yang dijaga telah memberi peluang berkembangnya kepiting, mengurangi dampak abrasi dan memberi kesempatan kepada Deris dan anggota kelompok masyarakat dalam naungan program CCDP-IFAD untuk mengembangkan pesona keindahan vegetasi mangrove yang ada melalui trackwisata sepanjang 200 meter dengan anggaran sekitar Rp. 200 juta. Bukan hanya itu, mereka juga menyiapkan tempat untuk pembenihan dan perawatan bibit mangrove. Selain pesona keindahan, manfaat ekonomi pun tak kalah besarnya.

Untuk menyisip lahan-lahan kosong di sela pohon mangrove, telah disiapkan bibitnya. Untuk pembibitan warga Oesapa punya pengalaman. Menurut Deris, ada warga bernama Obi Geon serta Jemy yang membudidayakan anakan mangrove. Di sekitar lokasi ini terdapat pula vegetasi cemara hutan yang menambah pesonanya.

Tenaga pendamping lapangan Oesapa bernama Derry menyebutkan bahwa agenda ke depan adalah mengembangkan lokasi ini seperti yang disebutkan Deris sebelumnya yaitu menambah panjang trek dan membangun gapura di jalan darat.

Berdasarkan pengerjaan sarana konservasi dan rekreasi yang tuntas selama satu bulan, Deris optimis bisa melanjutkan pembangunan trek tambahan.

“Awalnya dikerjakan hanya 7 orang anggota kemudian beberapa warga ikut membantu. Mulai dikerjakan pada tanggal 4 November 2015 hingga awal Desember 2016 dan diresmikan oleh Walikota Kupang, 13 Februari 2016 lalu,” kata Deris. Untuk memastikan keberlanjutan program ini Deris dan beberapa anggota kelompok telah menyiapkan mekanisme agar ada fee dari pengunjung. “Sementara ini masih suka



rela tapi nanti kita akan atur termasuk pengelolaan kebersihan atau sampah di sekitar lokasi ini,” katanya

“Ini akan tangan lama, kayu yang digunakan kayu meranti asal Sulawesi. Selain itu, di dasarnya kami cor dan bungkus dengan plastik, jadi kayu tak kena air,” kata suami Juvelina Umao yang juga ketua RT II/RWI, Kelurahan Oesapa.

Kris Long menambahkan bahwa semangat kerjasama di Oesapa masih sangat tinggi. “Kalau ada kerusakan dari bangunan, selain sumbangan-sumbangan kita juga akan gotong royong perbaiki, kalau dipanggil, warga pasti datang,” kata Kris. Kris juga menambahkan kalau Lurah Oesapa, ibu Vera Soe juga sering ke lokasi eko-wisata mangrove ini untuk kerja bakti.

Pesona bersambut

Optimisme Deris dan Kris itu nampaknya akan jadi kenyataan. Ke depan, beragam aktivitas lingkungan, sosial, ekonomi akan paralel dengan pengelola ekowisata mangrove Oesapa ini. Hingga kini, banyak sekali warga Kupang yang datang berekreasi ke sini. “Banyak sekali, ada untuk foto pra-wedding, pengambilan gambar



Sumber foto: www.ekowisata.ccdp-ifad.org

vocal grup, video shooting, mereka bayar hingga 100ribu sekali datang,” terang Deris.

Mengingat peluang dan manfaat kawasan Eko-wisata Mangrove Oesapa-Kupang ini, ke depan, pengelola dalam hal ini Daris dan kawan-kawannya akan mengusulkan dana tambahan untuk perluasan trek. Status lahan yang merupakan tanah Pemerintah memberinya keleluasaan untuk menawarkan pendekatan konservasi dan pengembangan ekonomi warga. Dukungan Pemerintah Kota Kupang sangat kuat, Walikota Jonas Saelan sangat peduli.

“Melalui APBD, tahun ini akan ada alokasi dana pembangunan jalan dan sarana prasarana lainnya,” ujar Dr. James Adam, konsultan CCDP-IFAD Kota Kupang. Menurut James, kerjasama antar SKPD telah terlihat, ini terbukti dengan peran yang akan diemban oleh Dinas Pariwisata Kupang dan Dinas PU.

“Kami ada permohonan ke IFAD untuk menambah jalur trek keluar, karena pada hari libur pengunjung padat sekali. Kita akan tambah 60 meter keluar dan tambah ke selatan. Lain pintu masuk, lain pula pintu keluar. Selain itu aka

ditambah pula gazebo sebagai tempat pertemuan,” lanjut Deris.

Kepala Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, KKP, Zulficar Mochtar, ST, M.Sc yang pernah menjadi team leader CCDP-IFAD memuji dan mendukung inisiatif warga Oesapa ini.

“Inisiatif eko-wisata adalah jembatan yang coba pertemukan konservasi, edukasi dan wisata. Oesapa Mangrove track di Kupang berada pada misi itu, sehingga sangat perlu didukung,” katanya. Menurut Zulficar, inisiatif di Oesapa perlu diakselerasi cepat dan dinamis, memastikan di lapangan, agar elemen tersebut tersebut bisa tercapai proporsional. Bukan wacana atau rencana.

Siang itu, terdapat tujuh orang pengunjung yang sedang menikmati pesona mangrove Oesapa yang dikelola kelompok PSDA, tiga orang mengenakan jaket kuning khas mahasiswa Universitas Artha Wacana Kupang dan dua pasang muda-mudi.

Andi, salah seorang pengunjung datang bersama Emmy. “Keren tempatnya walau saya kira awalnya jembatannya panjang,” aku Andi. Andi menambahkan bahwa ini pertama kali dia datang, dengan hadirnya kawasan eko-wisata ini maka sekarang untuk berwisata pantai tak harus ke Lasiana lagi, apalagi di sana sudah sangat padat.

“Intinya kerenlah,” ujar warga Kampung Kayu Putih, Kupang ini.

Upaya yang dilakukan kelompok PSDA Oesapa ini setidaknya dapat mengurangi tekanan pada aset tidak kurang 40ribu hektar mangrove NTT yang belakangan ini mengalami banyak tekanan karena dieksploitasi untuk bahan bangunan dan kayu bakar. Ke depan, akan ada banyak pengunjung seperti Andi dan Emmy ini.

Sekarang, bola pengelolaan ada di tangan pengurus PSDA untuk merawat dan menjaga pesona boak Oesapa, modal utama ekowisata di Kota Kupang sekaligus harapan bagi 26ribu lebih warga yang bermukim di Kelurahan Oesapa.

<https://denun89.wordpress.com/2017/01/17/pesona-boak-dari-oesapa/>

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Knowledge Management Consultant untuk CCDP-IFAD KKP.



Meningkatkan Kapasitas Pekerja Sosial untuk Layanan Kesejahteraan Anak Integratif

Bagian I



Di Sulawesi Selatan, kasus diversifikasi meningkat dari 53 anak pada tahun 2014 menjadi 314 anak di tahun 2015. Pada periode trimester pertama di tahun 2016, rata-rata anak yang melewati diversifikasi adalah 26 anak per bulan. Kota Makassar sendiri mencatat 41% kasus diversifikasi Sulawesi Selatan

biasa yang punya kelebihan dan kekurangan. Betapa pun cerdas dan baiknya dia, jika salah mengidentifikasi permasalahan yang ditemui maka dipastikan terjadi salah penanganan. Bisa fatal akibatnya.

Maka dari itu Yayasan BaKTI bersama UNICEF, dengan dukungan Pemerintah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Petugas *Frontline* PPKAI (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif) Kota Makassar dan Kabupaten Gowa pada tanggal 18-21 Januari 2017 di Hotel Best Western. Kedua wilayah ini merupakan bagian dari program percontohan untuk Layanan Kesejahteraan Anak Integratif yang diterapkan di 5 kabupaten/kota di Indonesia, bersama-sama dengan Tulungagung, Klaten, dan Solo.

Kegiatan yang diikuti oleh 64 orang yang berasal dari berbagai institusi yang terlibat dalam layanan keserjahteraan anak ini bertujuan membangun pemahaman dan keterampilan petugas layanan terdepan (*frontline*) yang terlibat langsung dalam layanan anak integratif sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu, melalui pelatihan ini diharapkan dapat membangun kerja sama yang baik antara pekerja sosial, Tenaga Kerja Sosial, dan pengelola layanan anak integratif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pekerja sosial adalah “profesi” yang masih sangat dibutuhkan, mengingat masih besarnya angka-angka yang menunjukkan betapa keadaan sebagian anak di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa masih sangat memprihatinkan walau Indonesia secara umum telah mencapai kemajuan signifikan dalam mereformasi sistem peradilan anak dengan melindungi anak lebih baik.

Amelia Tristiana (Ibu Tria)-Child Protection Specialist UNICEF memaparkan bahwa di Sulawesi Selatan, kasus diversifikasi

Oleh Mugniar Marakarma

Menebak tangis bayi pada orang tua baru adalah teka-teki. Apakah sang bayi menangis karena lapar, haus, karena buang air, atau karena merasa tidak nyaman. Kalau tidak nyaman pun perlu diidentifikasi lagi, apakah tidak nyaman karena sakit, ingin buang air tetapi tidak bisa keluar, ataukah ada gigitan serangga. Bagaimana kalau salah menebak? Pasti akan salah penanganan!

Begitu pun para petugas lapangan sebagai yang dalam tugas-tugas sosialnya adalah manusia



Foto: Dok. Yayasan BaKTI/ Arafah

telah meningkat dari 53 anak pada tahun 2014 menjadi 314 anak di tahun 2015. Pada periode trimester pertama di tahun 2016, rata-rata anak yang melewati diversi adalah 26 anak per bulan. Kota Makassar sendiri mencatat 41% kasus diversi Sulawesi Selatan dilayani melalui Kantor Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang berada di Kota Makassar. Namun sangat disayangkan ketika anak kembali ke rumah, belum ada mekanisme pemantauan dan pemberian layanan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut sehingga mereka rentan berhadapan dengan hukum kembali.

Hal-hal lain yang secara tidak langsung menunjukkan kerentanan dan potensi masalah adalah bahwa sejumlah besar anak tinggal di lembaga penitipan anak. Sebanyak 4.679 anak di Makassar tinggal di 102 lembaga penitipan anak (Dinas Sosial Kota Makassar, 2015) dan 4001 anak di Gowa tinggal di 42 lembaga penitipan anak (Kantor Dinas Sosial Gowa, 2014) meskipun mayoritas dari mereka masih memiliki satu atau kedua orang tua mereka masih hidup.

Selain itu, patut diwaspadai tingkat putus sekolah untuk anak usia 7 – 12 tahun adalah 3,03% di Makassar dan 1,78% di Kabupaten Gowa. Untuk anak usia 13 – 15 tahun sebesar 4,63% di Makassar dan 14,26% di Kabupaten Gowa. Dan untuk usia 16 – 18 tahun adalah 29,73% di Makassar dan 41,41% di Kabupaten Gowa. Meskipun ada peraturan daerah di Kabupaten Gowa yang memberi kewajiban bagi orang tua untuk menempatkan anak-anak di sekolah tetapi tampaknya kebijakan ini hanya berlaku untuk anak-anak sekolah dasar. Semakin

tinggi sekolah, semakin banyak anak putus sekolah terutama di kabupaten Gowa.

Selain Ameliana Tristiana, pelatihan ini didukung oleh 4 fasilitator lainnya, yaitu: Akbar Halim, peneliti PUSKAPA UI (Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia), Adie Erwan Soetopo (Balai Diklat Kemensos Regional 5), Andi Nurlela (Supervisor Sakti Peksos Sulawesi Selatan), dan Jumardi (Commit Foundation).

Pentingnya PPKAI Bekerja dalam Sistem yang Baik

Ketika ada kasus, pekerja sosial hendaknya memahami alur penanganannya. Di wilayah kita terdapat banyak lembaga. Setiap kasus dampaknya multi aspek yang butuh dukungan multi aspek tapi tidak ada lembaga tunggal yang bisa memberikan layanan. Layanan yang ada adalah layanan multi sumber. Layanan multi sumber ini membutuhkan kolaborasi atau kesepakatan bersama. Dalam perjalanannya, manajemen kasus adalah bentuk operasional untuk menyediakan layanan yang tepat. Dalam hal ini, penting adanya supervisi. Ada supervisor, seseorang yang memastikan orang-orang dalam lingkungannya mengerjakan tanggung jawabnya dengan benar dan bisa membantu mereka menjalankan tugasnya dengan baik, bukan sekadar meng-koordinasi.

Nah, di sinilah pentingnya peran PPKAI. PPKAI adalah lembaga yang punya kemampuan mengidentifikasi sehingga nanti para pekerja sosial yang berada di garis depan punya daftar network yang dibuat PPKAI. Adalah tugas PPKAI



Foto: Dok. Yayasan BaKTI/ Arafah

untuk membuat kolaborasi tingkat lembaganya. PPKAI harus mengembangkan manajemen kerangka kasus yang terencana. Ada pemetaan, asesmen. PPKAI akan menentukan kasus yang masuk berisiko tinggi, sedang, atau rendah lalu membuat perencanaan penanganan kasusnya. PPKAI yang memilah apakah layanan individu atau layanan kelompok yang akan diberikan. Misalnya ada 40 anak tidak punya akta kelahiran. PPKAI akan memfasilitasi pembahasan lintas sektor.

Setelah PPKAI menerima laporan, dianalisa dulu. Selanjutnya diputuskan apakah akan langsung ditangani atau dirujuk. Keputusan tersebut dikembalikan pada mekanisme yang disepakati di setiap wilayah. Lima wilayah yang memiliki layanan kesejahteraan anak integratif punya mekanisme yang berbeda.

Terkait pengelolaan data, contohnya adalah bagaimana pekerja lapangan bisa mencari data, selanjutnya data itu dimanfaatkan secara rapi oleh PPKAI. Data-data makro tidak menyentuh sisi kemanusiaan. Hanya berupa data besar. Tapi kalau data mikro yang dikasih, tidak akan ada kepala daerah yang tidak tersentuh. Data mikro, lebih bisa menjelaskan kerentanan dan risiko dari masalah-masalah masyarakat. Dalam pemeliharaan data, ada protokol tertentu yang mengaturnya. Juga ada panduan detail tentang bagaimana mengelola catatan kasus yang baik. Penting pula untuk diatur mengenai etika, prinsip, teknik menjaga kerahasiaan, mengendalikan penggunaannya, dan sebagainya.

Bicara tentang Sistem Perlindungan Anak, penting pula mengetahui komponen-

komponennya, yang berupa: norma, struktur, dan proses. Perubahan perilaku untuk solusi menuju keadaan yang lebih baik bisa diwujudkan tetapi ada prosesnya. Saat ini kita tidak bekerja berdasarkan isu lagi, melainkan bekerja berdasarkan sistem. Pendekatan Pengembangan Sistem bertujuan mempromosikan suatu Sistem Perlindungan Anak yang komprehensif, dengan menangani faktor risiko yang diketahui guna meminimalisasikan kerentanan anak dan merespons semua bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran

Visi baru perlindungan anak memberi peran kepada lembaga/institusi yang berfokus pada reintegrasi anak dengan keluarga. Di dalamnya ada pengakuan atas keberagaman, norma, dan budaya serta kekuatan dalam keluarga yang melibatkan relawan dan masyarakat lokal. Oleh sebab itu penting ada penguatan profesi pekerja sosial dan posisinya di pemerintahan. Pekerja sosial memiliki kewenangan untuk bekerja dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Sementara itu pemerintah provinsi memiliki wewenang dan anggaran untuk menyediakan layanan. Perluasan rentang layanan perlindungan anak ini mulai dari pencegahan (intervensi primer, intervensi dini), intervensi sekunder, hingga dukungan intensif terhadap anak dan keluarga (intervensi tersier).

Bersambung.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih jauh tentang Program ini, silahkan menghubungi email: info@bakti.or.id

Artikel

Target Tetap 35.000 MW pada 2019

Target program pembangunan pembangkit listrik pada 2019 tetap 35.000 megawatt. Pemerintah berupaya merealisasikan program itu mendekati target yang ditetapkan.

Demikian keputusan sidang paripurna ke-4 Dewan Energi Nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/1).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui, target yang dipatok pemerintah tidak mudah dicapai. Pencapaian pada 2019 diperkirakan 20.000 megawatt (MW) hingga 22.000 MW. Target dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) itu sudah disetujui Presiden Joko Widodo.

"Dalam waktu dekat, peraturan presiden mengenai hal ini akan diterbitkan," kata Pramono Anung usai rapat terbatas di Kantor Presiden, kemarin.

Selain dihadiri Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), sidang paripurna kemarin juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Wakil Ketua DEN serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan sebagai Ketua Harian DEN. Para anggota DEN juga hadir.

<http://batukarinfo.com/news/target-tetap-35000-mw-pada-2019>

Referensi

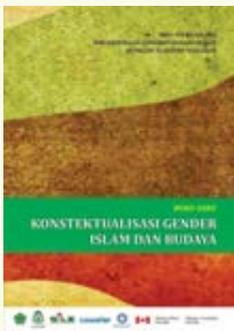


Panduan Pelatihan Dasar Asset Based Community Development (ABCD)

Publikasi ini merupakan produk Proyek SILE/LLD yang dilaksanakan dengan dukungan finansial dari Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada

Asset Based Community-driven Development (ABCD) merupakan salah satu unggulan program pada proyek Supporting Islamic Leadership/Local Leadership Development (SILE/LLD) yang diinisiasi dalam patron kerjasama Pemerintah Kanada dan Pemerintah Indonesia melalui dua institusi di bawah Kementerian Agama RI, salah satunya adalah UIN Alauddin Makassar. Aplikasi program ABCD sendiri telah dipraktekkan pada proses pendampingan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang terbentuk, kolaborasi antara akademisi dan praktisi penggiat Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat/Civil Society Organization - LSM/CSO), yang bekerja di delapan wilayah yang tersebar di Sulawesi Selatan. pada pelaksanaan Kemitraan Universitas - Masyarakat (KUM) dan KKN UIN Alauddin Makassar.

<http://www.batukarinfo.com/referensi/panduan-pelatihan-dasar-asset-based-community-development-abcd>



Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya

Gender, sebagai isu yang mendiskusikan implikasi yang ditimbulkan oleh perbedaan jenis kelamin, menempati posisi yang sangat strategis dalam membangun peradaban. Karena itu, agama juga memberikan porsi yang sangat spesial bagi persoalan gender. Bagaimana Islam dan kearifan lokal mendudukan laki-laki dan perempuan pada posisinya masing-masing dan hubungan antara keduanya, baik dalam ruang domestik maupun publik, hal-hal inilah yang akan diinformasikan dalam buku saku yang ada di hadapan pembaca.

<http://batukarinfo.com/referensi/kontekstualisasi-gender-islam-dan-budaya>



1-2 FEBRUARI 2017

Lokakarya Prototyping dan Uji Lapangan Konsep Transportasi Publik Kota Makassar

Pada September-November 2016, telah dilaksanakan studi lapangan dan workshop inovasi transportasi publik yang dicintai oleh masyarakat yang dilaksanakan oleh UNDP, UN Pulse Lab Jakarta, Yayasan BaKTI bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar serta beberapa organisasi sosial dan kreatif lainnya. Dalam workshop bulan November 2016, 3 ide dipilih untuk melalui proses inkubasi. Ke tiga ide tersebut lebih dimatangkan lagi melalui proses inkubasi - prototyping dan uji lapangan yang akan dilakukan oleh tim kerja bersama dengan UNDP, UN Pulse Lab Jakarta dan Yayasan BaKTI. Tujuan proses inkubasi ini adalah agar ide yang ada dapat dikembangkan lewat uji lapangan dan syarat implementasi konsep tersebut dapat digali lebih dalam bersama dengan para stakeholder terkait.

Proses prototyping dan uji lapangan, diawali dengan workshop yang dilaksanakan pada tanggal 1-2 Februari 2017 bertempat di kantor BaKTI Makassar. Hadir pada sesi pembukaan Walikota Makassar-Danny Pomanto, Asisten Bidang Pemerintahan Kota Makassar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, *Head of Governance Unit* UNDP Indonesia-Siprianus Bate Soro, dan *Governance Specialist* UNDP regional-Paavani Reddy. Pada kesempatan ini, bapak Wali Kota Makassar, memaparkan konsep *Smart Petepete* yang telah diluncurkan akhir tahun 2016. Beliau juga mendengarkan tiga konsep yang ditawarkan sebagai solusi untuk mendukung *Smart Petepete* yang dipaparkan oleh tim kerja yang terdiri dari komunitas kreatif dan start up, media, pemerhati transportasi, dan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Konsep pertama, PASIKOLA (*Petepete Anak Sekolah*) yang mengoptimalkan *pete-pete* yang sudah ada sebagai angkutan khusus bagi anak-anak sekolah. Kedua, Sistem *Feeder Bajikia*, mengurai trayek utama yang padat dan mengarahkannya ke dalam pemukiman/kompleks perumahan. Ketiga, *E-Nassami*, suatu sistem informasi dan komunikasi untuk transportasi publik di Makassar.

10 FEBRUARI 2017

Kelas Craft

Sayur dan Buah menjadi Stempel Cantik di Kelas Craft Anak BaKTI

Sebanyak 19 anak berusia 4-10 tahun duduk mengelilingi naman kayu yang didalamnya terdapat beragam sayur dan buah, seperti sawi, wortel, kentang, pare, jagung dan apel. Hari ini mereka akan menghias tas serut dengan menggunakan stempel yang terbuat dari sayur dan buah!

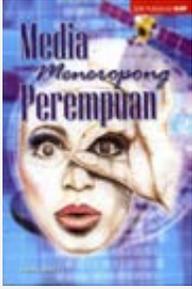
Stempel buah dicelupkan ke cat minyak lalu dibubuhkan ke atas tas serut. Anak-anak peserta Kelas Craft melakukannya dengan gembira sambil sesekali bercanda. Kak Wana dan kak Fanny, duo crafter Makassar, hari itu menjadi instruktur Kelas Craft. Mereka dengan sabar memberi contoh dan mendampingi anak-anak menghias tas serut masing-masing.

Di tengah acara, Ibu Winarni Monoarfa, Dewan



Penasihat Yayasan BaKTI yang sedang berkunjung ke Kantor BaKTI menyempatkan diri berinteraksi bersama anak-anak peserta Kelas Craft dengan mengajak mereka bernyanyi, membuat yel yel, dan berfoto bersama.

Anak-anak dan orang tua sangat antusias dengan kegiatan ini. Di akhir acara, mereka dengan gembira memamerkan tas serut masing-masing yang sudah dihias dengan stempel aneka warna dan motif.



Media Menorpong Perempuan

PENULIS Ludfy Baria

Perempuan, dalam bingkai media, adalah sosok yang atraktif. Mampu mempertinggi rating ataupun menaikkan jumlah oplah. Apapun yang menyangkut perempuan, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki selalu menarik untuk ditampilkan. Tayangan-tayangan kekerasan, di sisi lain, hadir bagai sebuah pisau bagi perempuan. Mereka dapat digunakan sebagai kekuatan pendukung untuk mengungkapkan kekerasan yang terjadi, atau malah sebaliknya. Akan ada penjiplakan tingkah laku oleh penonton yang kemudian membuatnya menjadi seorang pelaku kekerasan. Persoalan-persoalan itulah yang dipaparkan dalam buku ini.



Mewujudkan Desa Inklusif

PENULIS Dakelan, Miftahul Huda, Achmad Murtafi Haris, dan Aji Dahlan

Ada banyak persoalan yang terjadi di desa, meski telah ada kewenangan mengelola anggaran sendiri melalui APBD desa. Undang-undang Desa dalam menyusun kebijakan pembangunan wajib melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa. Namun fenomena yang terjadi di lapangan, keterlibatan masyarakat masih minim. Hal ini terjadi karena tidak adanya informasi yang memadai bagi masyarakat tentang bagaimana mereka dapat terlibat dalam proses perencanaan dan pembangunan desa. Buku panduan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan bagi komunitas untuk berperan aktif dalam perencanaan dan penganggaran desa. Menjadi masukan bagi aparat desa dalam memperbaiki tata kelola perencanaan dan penganggaran desa agar lebih partisipatif, pro poor, dan responsif gender. Serta buku ini bisa menjadi bahan bagi dosen dan mahasiswa dalam mata kuliah Studi Pembangunan dan Praktikum mahasiswa, serta Kuliah, Kerja Nyata (KKN) mahasiswa.



Kerlip Cahaya di Perbatasan

PENULIS Irma Sabriany, dkk

Buku ini merekam catatan-catatan dari sejumlah anak muda pemberani yang bersedia ditempatkan sebagai fasilitator pembangunan PLTS di pulau-pulau terluar. Anak muda ini mulanya dipenuhi hasrat berpetualang untuk menyaksikan Indonesia di titik terjauh, lalu mengikuti panggilan hati untuk melakukan berbagai hal yang bermanfaat bagi masyarakat pulau. Dengan penuturan langsung, buku ini menjadi lebih orisinal dan fresh dalam menggambarkan dinamika masyarakat yang berinteraksi dengan program pemerintah. Melalui catatan itu, kita bisa merasakan apa yang sedang terjadi, apa yang dibutuhkan masyarakat, serta banyaknya pekerjaan rumah yang harus ditunaikan demi mewujudkan visi bangsa kita sebagai bangsa maritim, bangsa yang berdaulat di lautan, bangsa yang disebut Bung Karno sebagai cakrawati samudera.



OFF

PENULIS Nasrul

Buku OFF berisi peristiwa, cerita di balik kematian tokoh, dan kisah lain yang bertalian dengan kematian. Adapun pemilihan tokoh berdasarkan kekinian cara mereka meninggal. Mulanya buku ini akan diberi judul MATI KONYOL sebab sebagian isinya tentang kisah tokoh yang meninggal dengan cara yang konyol. Namun karena beberapa di antara tokoh itu, meski sedikit, dianggap melakukan hal yang bermanfaat dan heroik sebelum mengembuskan napas terakhir maka judul tersebut tidak digunakan.